

**FENOMENA MELEMAHNYA PINK TIDE DI AMERIKA LATIN, STUDI
KASUS : KEMENANGAN KOALISI PARTAI TENGAH DI PEMILIHAN
PRESIDEN ARGENTINA PADA TAHUN 2015**

SKRIPSI



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Oleh :

MUHAMMAD HAFIDH

14323086

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2018

**FENOMENA MELEMAHNYA PINK TIDE DI AMERIKA LATIN, STUDI
KASUS : KEMENANGAN KOALISI PARTAI TENGAH DI PEMILIHAN
PRESIDEN ARGENTINA PADA TAHUN 2015**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Hubungan Internasional

Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat Guna Memperoleh

Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh :

MUHAMMAD HAFIDH

14323086

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA**

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2018

HALAMAN PENGESAHAN

FENOMENA MELEMAHNYA PINK TIDE DI AMERIKA LATIN, STUDI KASUS :
KEMENANGAN KOALISI PARTAI TENGAH KANAN DI PEMILIHAN PRESIDEN
ARGENTINA PADA TAHUN 2015

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional

Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-syarat Guna Memperoleh

Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Pada Tanggal
30 JUL 2018

Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Ketua Program Studi



Irawan Jati, S.IP., M.Hum., M.S.S

Dewan Penguji

1. Hangga Fathana, S.IP., B.Int.St., M.A
2. Irawan Jati, S,IP., M.Hum., M.S.S
3. Enggar Furi Herdianto., S.IP., M.A

Tanda Tangan

PERNYATAAN ETIKA AKADEMIK

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Muhammad Hafidh
No. Mahasiswa : 14323086
Program Studi : Hubungan Internasional
Judul Skripsi : Fenomena Melemahnya Pink Tide di Amerika Latin, Studi Kasus: Kemenangan Koalisi Partai Tengah Kanan pada Pemilihan Presiden Argentina Tahun 2015

Melalui surat ini saya menyatakan bahwa :

1. Selama melakukan penelitian dan pembuatan laporan penelitian skripsi saya tidak melakukan tindakan pelanggaran etika akademik dalam bentuk apapun, seperti penjiplakan, pembuatan skripsi oleh orang lain, atau pelanggaran lain yang bertentangan dengan etika akademik yang dijunjung tinggi Universitas Islam Indonesia. Karena itu, skripsi yang saya buat merupakan karya ilmiah saya sebagai peneliti, bukan karya jiplakan atau karya orang lain.
2. Apabila dalam ujian skripsi saya terbukti melanggar etika akademik, maka saya siap menerima sanksi sebagaimana aturan yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.
3. Apabila dikemudian hari, setelah saya lulus dari Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia ditemukan bukti secara meyakinkan bahwa skripsi ini adalah karya jiplakan atau karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang ditetapkan Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 3 Juli 2018

Yang menyatakan



Muhammad Hafidh

HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahrabbi'l'amin

Karya sederhana ini kupersembahkan untuk :

Ayah dan Ibu

Atas segala doa, dukungan, perjuangan, pengorbanan, nasehat, perhatian, semangat, cinta dan kasih sayang yang tak terhingga, yang telah diberikan selama ini

Abang dan Adik

Atas semua doa, dukungan, motivasi, kasih sayang, nasehat yang selalu ingin menjadikan penulis lebih baik dan dapat bermanfaat bagi orang lain.

Semua Keluarga Besar

Terima kasih atas doa, nasehat, dan bantuan yang telah diberikan selama ini.

HALAMAN MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْمُتَشْرِحُ لَكَ صَدْرَكَ ① وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ ② الَّذِي أَنْقَضَ
ظَهْرَكَ ③ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ④ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ⑤ إِنَّ مَعَ
الْعُسْرِ يُسْرًا ⑥ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ⑦ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ ⑧

“Bukankah Kami telah melapangkan untukmu dadamu?, Dan Kami telah menghilangkan daripadamu bebanmu, yang memberatkan punggungmu? Dan Kami tinggikan bagimu sebutan (nama)mu. Karena sesungguhnya, sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (Dari sesuatu urusan), kerjakanlah sungguh-sungguh (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhan-Mulah engkau berharap.”

(Q.S. Al-Insyirah 94 : 5-8)

”Success is stumbling from failure to failure with no loss of enthusiasm”

Sir Winston Churchill

“Seseorang masih menjadi pemilik masa depannya, meskipun gagal meraih dan menggenggam masa lalu. Karena masa depannya ditentukan oleh aksinya hari ini”

Hasan Muhammad di Tiro

PRAKATA



Segala puji dan syukur tak terhingga kepada Allah *Subhanallahu wa ta'alla* yang Maha Agung dan Maha Pengasih atas nikmat dan rahmat-Nya, serta segala kekuatan, kemudahan dan kelancaran sehingga karya ini dapat terselesaikan dengan baik. Sholawat dan salam selalu tucurahkan kepada Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam*, keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Peneliti menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini banyak pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, dan dukungan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini perkenankan peneliti mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Dr. H. Fuad Nashori, S.Psi., M.Si., Psikolog selaku Dekan Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Irawan Jati, S.IP.,M.Hum.,M.S.S selaku Ketua Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia.
3. Ibu Karina Utami Dewi, S.IP.,M.A. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang memberikan dukungan dan motivasi, serta berkenan meluangkan waktunya untuk membantu peneliti dalam pengurusan skripsi secara administrasi.

4. Bapak Hangga Fathana S.IP., B.Int.St., M.A. selaku Dosen Pembimbing Skripsi, atas arahan, diskusi, kesabaran dalam membimbing, meluangkan waktu, dan kemudahan bagi peneliti selama ini, serta selalu memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Semoga Allah senantiasa membalas kebaikan Bapak dengan kebaikan yang lebih mulia.
5. Seluruh dosen Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia atas setiap ilmu yang telah diberikan kepada peneliti selama menempuh masa perkuliahan sampai saat ini.
6. Seluruh karyawan Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia atas segala bantuan dan kemudahan yang diberikan kepada peneliti selama menjadi mahasiswa.
7. Mba Mardiatul Khasanah yang telah membantu dalam pengurusan izin dan surat-surat kebutuhan penelitian, serta memberi kemudahan kepada peneliti untuk melakukan penelitian.
8. Kedua orang tua yang tercinta, yang tiada hentinya memberikan doa, cinta, kasih sayang, dukungan, serta pengorbanan yang tak terhingga selama ini hingga skripsi ini dapat diselesaikan.
9. Abang dan Adik yang telah memberikan dukungan, motivasi, dan doa selama peneliti mengerjakan skripsi.
10. Athira Hartini yang telah memberikan semangat, doa, dukungan, motivasi, dan bantuan selama ini. Semoga segala urusan dilancarkan, berkah, dan semoga sukses selalu.

11. Para Sahabatku tercinta di Aceh, Faathir, Farizan, Aulia, Emir, Mirza, Akram, Aziz, Auzan, Ivan, Habibi, Agung, Fauzan, Satria, Auzan, Haris. Terimakasih atas segala dukungan, kebersamaan, motivasi selama ini.
12. Keluarga Barakuda, Firman, Akbar, Jo, Anang, Dzikra. Tempat semua cerita, bahagia, sedih, dan motivasi berpulang. Sukses selalu teman !
13. Teman-teman seperjuangan, Sultan, Endo, Alfian, Andiasta, Ariandi, Bayu, Bagir, Dayat, Ikmal, Roby, Panji, Tezar atas segala bantuan, dukungan, kekeluargaan, dan kebersamaan, saat susah maupun senang selama ini. Semangat skripsian ya.
14. Keluarga BoE Komahi UII, Azeem, Thalia, Sarini, Siti, Dayat, atas segala bantuan, motivasi, keceriaan, dan kehangatan selama ini. Semoga Allah membalas kebaikan kalian.
15. Kakak – kakaku, Akmal Maulana Ridho Sanggusti, Dinny Yulanda, dan Hans Mahenta, Rizka, Afwan, terimakasih atas segala bantuan, nasehat, dukungan, kekeluargaan, dan pengalamannya selama kuliah.
16. Sabi Squad, Eryan, nanda, Daffa, Alza, Bibul, Guruh, Harris, Afi, Ol, Chek, Arum, Winni, Mimid, dan lainnya. Terimakasih untuk waktu dan keceriaannya.
17. Keluarga KOMAHI UII 2016. Terimakasih untuk keikhlasan dan ketulusan selama setahun menjadi tempat belajar penulis dalam membangun KOMAHI UII.
18. Keluarga Forum Mahasiswa Kutaraja Yogyakarta. Terimakasih untuk semua kerjasama dan semangatnya selama ini. Terus berkarya untuk Aceh.

19. Teman-teman bimbingan “HF Squad” atas segala bantuan, arahan, dan dukungan selama menyelesaikan skripsi ini. Semoga semua urusan kalian dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah SWT.
20. Teman - teman seperjuangan Hubungan Internasional 2014, atas segala bantuan dan kebersamaan selama masa kuliah di Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia.
21. Semua pihak yang telah membantu peneliti dengan penuh keiklasan, yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas segala bantuan yang telah diberikan kepada peneliti.

Pada akhirnya, peneliti mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti dan semua pihak yang berkenan menelaah di kemudian hari. Semoga Allah SWT memberikan limpahan Rahmat, karunia dan balasan yang lebih baik atas kebaikan semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung membantu terwujudnya skripsi ini, amin ya Rabbal alamin.

Yogyakarta, 5 Agustus 2018

Penulis

Daftar Isi	
Daftar isi	xi
Lampiran	xii
BAB I Pendahuluan	
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Rumusan Masalah.....	4
I.3 Tujuan Penelitian	5
I.4 Signifikansi.....	5
I.5 Lingkup Penelitian.....	5
I.6 Kajian Pustaka.....	6
I.7 Kerangka Konsep.....	10
I.8 Metode Penelitian	16
BAB II Transisi Politik Argentina : Dari Militerisme Ke Demokrasi Serta Perkembangannya	19
II.1 Militer dalam politik Argentina.....	19
II.2 Transisi Politik	25
II.3 Demiliterisasi dan Demokrasi di Argentina	29
BAB III Dinamika Politik Oposisi, Kekuasaan Pemerintah, Dan Perkembangan Ekonomi	
III.1 <i>Justicialist Party</i> dalam Politik Argentina dan kekalahan Pemilihan Presiden 2015	48
III.2 Ledakan Komoditas dan Populisme	55
III.3 Fragmentasi di Dalam <i>Justicialist Party</i>	68
III.4 Kekuatan Oposisi	72
BAB IV Kesimpulan dan Rekomendasi.	
IV.1 Kesimpulan.....	81
IV.2 Rekomendasi.....	87
Daftar Pustaka	88

Daftar Lampiran

Gambar

Gambar 1.1: Peta Kekuatan Politik di Amerika Latin Berdasarkan Partai Penguasa	3
Gambar 2 .1: Rasio Anggaran Militer Argentina terhadap GDP	35
Gambar 2.2: Argentina Freedom Index 1983-2015	41
Gambar 2.3: Indeks Demokrasi Argentina.....	42
Gambar 3.1: Persentase Total Ekspor Negara Amerika Latin Ke Tiongkok dari Total Ekspor	57
Gambar 3.2: Persentase Ekspor terhadap GDP Argentina.....	59
Gambar 3.3: Persentase Pertumbuhan Ekonomi Argentina.....	60
Gambar 3.4: Tingkat pendidikan dan ekonomi pada pemilih Argentina	63
Gambar 3.5: Kondisi Ekonomi dan PDB Argentina Setelah Berakhir Ledakan Komoditas	66
Gambar 3.6: Pandangan Pemilih Tahun 2015 Terhadap Ekonomi era Kirchner..	67
Gambar 3.7: Peta Sebaran Pemilih Menurut Wilayah Pada Pemilihan Presiden Argentina 2015.....	78

Tabel

Tabel 1.1 Variabel Transisi Politik dalam Teori Haggard dan Kaufman 11

Tabel 2.1: Pemicu dan Proses Pergantian Rezim di Argentina..... 44

Tabel 3.1: Persentase Persebaran Suara Parlemen Argentina..... 53

Tabel 3.2: Daftar Koalisi Pemerintah dan Koalisi Oposisi Argentina..... 75

BAB I

PENDAHULUAN

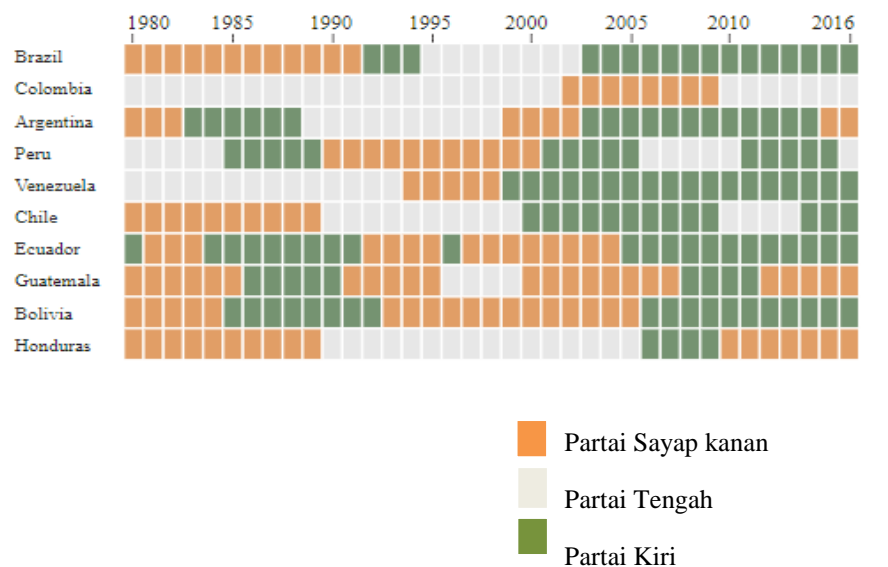
I.1 Latar Belakang

Pada awal 2000-an, negara-negara di Amerika Latin sering disebut dengan sebutan '*Pink Tide*' (gelombang merah muda), dimana sebutan tersebut menggambarkan penggabungan antar kedua kekuatan besar dalam masa Perang Dingin. Pada satu sisi mereka menggunakan sistem demokrasi dalam segi politik, namun mereka menganut sistem ekonomi nasionalis dan kerap dikaitkan dengan ekonomi sosialis dan populisme. Populisme adalah paham politik yang memperjuangkan kepentingan sekelompok orang yang disebut "*the people*" melawan mereka yang disebut dengan "*hegemonic elite*" yang dianggap antagonistik terhadap "*the people*". Populisme berkembang melalui pemenuhan akan permintaan politik tertentu (Laclau, 2005). Dalam menjalankan praktek politiknya, Populisme secara aktif menjadikan distribusi akan material kepada konstituennya secara pragmatis untuk terus mendapatkan dukungan (Weyland, 1999). Model kebijakan ini umumnya digunakan oleh partai sayap kiri.

Gelombang merah muda mulai mencapai masa kegemilangannya ketika Hugo Chavez, naik menjadi presiden Venezuela pada tahun 1999. Gelombang ini kemudian diikuti dengan naiknya Presiden Lula da Silva di Brasil, lalu Nestor Kirchner di Argentina, hingga naiknya Evo Morales sebagai presiden Bolivia. Tokoh-tokoh ini merupakan pemimpin yang berasal dari partai *centre left* dan mereka kemudian menjadi "tulang punggung" dari kebijakan populis yang ada di Amerika Latin.

Pada Pemilihan Presiden tahun 2015 di Argentina, peta perpolitikan negara tersebut bergeser dari yang awalnya dikusai oleh partai sayap kiri, beralih ke *centre-right party* (partai tengah-kanan). Kemenangan Mauricio Macri yang pro terhadap kebijakan ekonomi neoliberal dalam pemilu Argentina, lalu kejayaan oposisi dalam parlemen Venezuela, serta pemilu Peru yang memenangkan partai sayap kanan, yang kemudian diikuti oleh beberapa negara lainnya, seperti Chile, dan Brazil. telah menghentikan dominasi partai sayap kiri selama 2 dekade di beberapa negara tersebut.

Sedangkan kebijakan ekonomi Neoliberal adalah sebuah paham ekonomi politik yang menekankan pada pentingnya kebijakan ekonomi yang berbasis kepada pasar. Dengan mengimplementasikannya akan ada banyak perubahan dalam hubungan negara dan juga masyarakat dengan menekankan pasar dan mengesampingkan peranan negara. Bentuk kebijakannya meliputi; mempertahankan kestabilan makroekonomi, menyediakan barang publik seperti infrastruktur, menghilangkan kontrol harga barang (King, 2010).



Gambar 1.1: Peta Kekuatan Politik di Amerika Latin Berdasarkan Partai Penguasa (Kraull, 2016)

Kekuatan partai *centre left* di Argentina dimotori oleh *Justialist Party* (JP). Partai yang dibangun oleh Juan Domingo Peron, mantan Presiden Argentina. *Justicialist Party* telah mendominasi perpolitikan di Argentina sejak terpilihnya pemerintahan Carlos Ménem pada tahun 1989, yang kemudian menguasai hampir semua pemilihan presiden di Argentina, hingga terpilihnya Christina Fernandez de Kirchner, istri Néstor Kirchner, sebanyak dua kali berturut-turut pada tahun 2007 dan 2011.

Kemenangan Mauricio Macri di Argentina dari koalisi partai tengah-kanan (*Cambimeos*) dengan slogannya *Let's Change*, menjadi sangat menarik karena menjadi awal dari munculnya gelombang kemenangan partai tengah-kanan, serta menjadi titik balik kejayaan partai tengah-kanan setelah hampir 20 tahun dikuasai oleh partai tengah-kiri. Kemenangan Macri ini terjadi ketika perekonomian Argentina sedang mengalami krisis. Sejak tahun 2012, pemerintahan Christina

Kirchner mengalami permasalahan ekonomi yang cukup pelik. Inflasi yang mencapai angka 38%, serta pertumbuhan ekonomi yang mencapai -2% pada tahun 2014 (Economics, 2017). Permasalahan ini diperparah dengan devaluasi mata uang Peso Argentina sebesar 30 %, yang ditenggarai akibat kebijakan ekonomi populisme dan proteksionis dari Kirchner. Naiknya Macri juga mengakhiri dominasi kebijakan ekonomi tertutup dan menggantikannya dengan kebijakan ekonomi berbasis pasar terbuka di Argentina. Macri merupakan seorang ekonom yang bermazhab neoliberalis dan sangat percaya pada sistem ekonomi internasional, hal ini dapat dilihat dari program-program ekonomi yang dijanjikannya pada masa kampanye.

Krisis ekonomi yang terjadi dalam perekonomian Argentina memang menjadi masalah besar dalam perpolitikan Argentina. Pertumbuhan ekonomi yang negatif serta inflasi yang cukup tinggi berpengaruh pada peta politik yang ada, khususnya elektabilitas calon dari partai sayap kiri, Daniel Scioli. Dalam pemilihan Presiden yang dilaksanakan pada masa resesi ini, Mauricio Macri dari koalisi *Cambimeos* berhasil memanfaatkan momentum yang baik untuk mengambil alih pemerintahan rezim Kirchner. Koalisi yang beranggotakan Republican Proposal (PRO), Radical Civic Union, Civic Coaliton ARI, menjadi lawan politik yang cukup kuat bagi JP. Koalisi memiliki suara yang cukup besar dalam parlemen Argentina dengan 109 anggota berbanding 72 dari JP.

I.2 Rumusan Masalah

Mengapa koalisi partai tengah-kanan yang berideologi Neoliberalisme berhasil memenangi pemilihan Presiden Argentina tahun 2015?

I.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui mengapa gelombang merah muda semakin melemah di Amerika Latin.
2. Untuk mengetahui mengapa terjadi pergeseran kekuasaan dalam politik Argentina.
3. Untuk mengetahui peran krisis ekonomi dalam perubahan politik di sebuah negara.

I.4 Signifikansi

Dalam penelitian ini, penulis mencoba untuk melihat bagaimana adanya perubahan rezim di Argentina dengan menggunakan faktor krisis ekonomi yang menjadi variabel dalam menganalisis. Kawasan Amerika Latin secara umum telah merasakan perubahan model kebijakan ekonomi yang beragam cara penerapannya, termasuk Argentina. Banyak peneliti yang telah meneliti tentang perubahan rezim serta pola kebijakan ekonomi yang ada di Argentina, namun penelitian ini banyak berbicara tentang perubahan dari Carlos Ménem ke pemerintahan Populis Néstor Krichner. Maka pada penelitian ini, penulis melihat bagaimana kejatuhan rezim Kirchner yang populis digantikan oleh Mauricio Macri yang bermazhab neoliberal dengan menggunakan krisis ekonomi sebagai faktornya.

I.5 Lingkup Penelitian

Penelitian mengenai perubahan rezim di Argentina dari pemerintahan Kirchner yang merupakan presiden dari partai sayap kiri kepada Mauricio Macri dari sayap kanan dengan variabel gejolak perekonomian ini, termasuk ke dalam

kajian Ekonomi Politik. Dalam penelitian ini, penulis akan menganalisis hanya dari pemerintahan Néstor Kirchner dan Christina Fernandez, hingga masa awal pemerintahan Mauricio Macri. Hal ini menarik dikarenakan rezim Kirchner adalah masa dimana gelombang merah muda mencapai masa keemasannya di Argentina dan kawasan Amerika Latin. Rezim Kirchner telah meletakkan pondasi yang kuat terhadap kebijakan ekonomi populis di Argentina dan sempat berhasil memberikan dampak positif di awal pemerintahannya, namun jatuh setelah terkena dampak krisis ekonomi dan digantikan dengan Mauricio Macri.

Dalam penelitian ini, penulis akan mengambil faktor ekonomi seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan hutang negara untuk melihat bagaimana krisis perekonomian yang terjadi di Argentina.

I.6 Kajian Pustaka

Pada tulisan yang berjudul “*The End of Golden Decade*” (Yunes, 2015), adanya sebuah bentuk pemerintahan yang menjalankan kebijakan yang bersifat populis seperti yang diterapkan oleh beberapa negara, sangatlah terbantu dengan adanya *booming* komoditas di awal tahun 2000-an. Naiknya harga-harga seperti minyak, batu bara, dan beberapa bahan tambang lainnya, memberikan dampak yang baik dalam perekonomian beberapa negara Amerika Latin, khususnya Venezuela, Brazil, dan Argentina. Negara-negara ini memang cukup bergantung pada pergerakan harga komoditas, dan dengan naiknya nilai jual bahan-bahan komoditas ini, membuat pemimpin sayap kiri lebih mudah dalam menjalankan kebijakannya yang bersifat populis. Namun jatuhnya harga komoditas sejak

dekade awal 2010, menjadikan kepemimpinan sayap kiri, susah untuk menjalankan kebijakan-kebijakannya.

Perubahan kepemimpinan dalam sebuah negara juga menjadi penelitian dari Daron Acemoglu dan James A. Robinson (Daron Acemoglu, James A. Robinson, 2001). Mereka mencoba melihat bagaimana krisis ekonomi disebuah negara dapat mempengaruhi sistem politiknya. Dalam penelitiannya, mereka mencoba melihat dampak dari sistem perpajakan di dua tipe negara, demokrasi dan non-demokrasi. Mereka mencoba melihat bagaimana dampak dari tingkat pajak kepada orang kaya dan orang miskin kepada masyarakat. Pajak yang kemudian dapat mempengaruhi kebijakan fiskal sebuah negara akan sangat menentukan arah distribusi keuangan sebuah negara. Apabila tingkat kemiskinan yang semakin tinggi diakibatkan kesalahan dari negara dalam mengatur kebijakan fiskalnya, maka akan semakin besar pula potensi terjadinya pergantian kekuasaan.

Senada dengan Marcelo, Claire melihat permasalahan di yang ada di Brazil dan Venezuela sekarang ini terkait gejolak politik adalah, selain dari pendapatan yang negara dapatkan dari harga komoditas, perekonomian nasional mereka juga bergantung pada konsumsi domestic public. Konsumsi publik selama ini didorong dengan begitu besarnya program sosial yang ditawarkan oleh pemerintah. Namun pengaruh jatuhnya harga komoditas membuat konsumsi publik pun semakin menurun, hal ini kemudian menyebabkan adanya stagnasi pertumbuhan ekonomi yang terjadi (Claire, 2016).

Hal ini juga diungkapkan oleh Sebastian (Edward, 2010) dalam buku yang berjudul “*Left behind, and the false promises of populism*”, mengatakan bahwa populisme di Amerika Latin tidak memperhitungkan ekonomi global sebagai sebuah variable utama dalam melihat perekonomian dalam negerinya. Negara-negara seperti Venezuela, dan Brazil, memproyeksikan ekonomi mereka tetap dengan asumsi *booming* harga komoditas. Hal ini mencapai masalahnya ketika anjloknya harga-harga bahan mentah di pasar global. Para pemimpin di Amerika Latin menggunakan banyak dari hasil APBN yang mereka miliki untuk “membiayai” para pemilihnya untuk terus berkuasa.

Dalam buku “*China on the Ground in Latin America* ” yang ditulis oleh Ellis (Ellis, 2014), adanya pengaruh perlambatan ekonomi Tiongkok, sebagai negara yang menjadi pengimpor terbesar dari Amerika Latin, terhadap perekonomian dalam negeri Amerika Latin, seperti Brazil, Argentina, dan Chile. Impor terbesar mereka ke Tiongkok adalah bahan hasil agrikultur, hal ini kembali memperkecil pendapatan negara-negara tersebut akan semakin besarnya defisit perdagangannya.

Permasalahan ekonomi dalam negeri yang terjadi di Amerika Latin, pastinya membawa dampak buruk terhadap rezim pemerintahan sayap kiri. Pemerintahan sayap kiri kemudia menghadapi krisis kepercayaan dari rakyat terhadap rezim ini. Populisme di Amerika Latin, memberikan ruang yang cukup kecil terhadap investasi-investasi dari luar khususnya dibidang-bidang energi dan infrastruktur, regulasi yang ketat menjadikan tingkat investasi di negara ini tidak berjalan dengan mulus, berbeda dengan sayap kanan yang lebih membuka diri terhadap investasi di tengah perekonomian global yang semakin bergantung satu

sama lainnya, seperti yang dikatakan dalam buku yang berjudul “*Neoliberal Hegemony and the Pink Tide in Latin America*” (Chodor, 2015).

Akibat dari krisis perekonomian yang terjadi di domestik negara-negara, Venezuela, Brazil dan Argentina, yang disebabkan pula oleh perekonomian global sebagai salah satu faktornya, merupakan peluang bagi partai sayap kanan untuk mengambil alih pemerintahan dari sayap kiri. Dengan beberapa pemilu yang telah terjadi memperlihatkan trend politik yang demikian, namun bagi Federic Fuentes (2016), terlalu cepat untuk mengatakan bahwa populisme telah runtuh di Amerika Latin. Masih banyak pemilu yang akan berlangsung dan kita tidak pernah tahu apa hasil selanjutnya. Menurut Fuentes, sulit bagi Amerika Latin untuk mengalami pergeseran kekuatan politiknya, melihat latar belakang sejarah yang ada di negara-negara Amerika Latin.

Beberapa literatur di atas memperlihatkan bagaimana analisis permasalahan perekonomian Amerika Latin yang disebabkan pengaruh ekonomi global terhadap perubahan politik yang ada di Amerika Latin, dan menjadi sangat berguna bagi penulis dalam mengembang penelitian ini.

I.7 Kerangka Konsep

Teori Political Economy of Political Transition Haggard dan Kauffman

Stephen Haggard dan Robert R. Kaufmann mencoba melihat perubahan politik pada sebuah negara berdasarkan kondisi ekonomi dari negara tersebut (Stephen Haggard, Stephen R. Kaufman, 1997). Dalam menjelaskan teorinya ini, Haggard dan Kauffman mengambil sampel di beberapa negara dengan fokus pada kawasan Amerika Latin. Dalam penelitiannya, mereka mencoba melakukan elaborasi bagaimana perubahan rezim kepemimpinan otoriter ke kepemimpinan demokratis terjadi.

Menurut Haggard dan Kaufman, hubungan antara ekonomi dan politik memang telah menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi masa depan sebuah rezim. Amerika Latin telah menjadi salah satu kawasan yang paling menarik untuk melihat hubungan ekonomi dalam perubahan politik daerah tersebut. Perubahan politik di Amerika Latin sering terjadi ketika terjadinya resesi perekonomian atau gejolak ekonomi lainnya. Sehingga transisi politik akan sangat mungkin terjadi ketika adanya permasalahan perekonomian khususnya ketika terjadinya resesi ekonomi.

Hal ini sejalan dengan pola yang ditemukan oleh Stephan Haggard dan Robert R. Kaufman. Mereka mendokumentasikan banyak transisi dari pemerintahan otoritarian ke pemerintahan yang demokratis di Amerika Latin terjadi selama krisis ekonomi. Mereka merangkum temuan mereka dengan menulis "di Argentina, Bolivia, Brasil, Peru, Uruguay dan Filipina, transisi

demokratis terjadi dalam konteks kesulitan ekonomi yang parah yang menyebabkan pergerakan oposisi". (Haggard, Stephen Kaufman, 1995).

Tabel 1.1 Variabel Transisi Politik dalam Teori Haggard dan Kaufman

Variabel	Transisi ketika Krisis
Tantangan Politik ekonomi Terhadap kekuasaan Otoriter	Tuntutan politik yang diikuti dengan: <ul style="list-style-type: none"> • Membelotnya elit bisnis • Protes massa dengan motif ekonomi • Terbelahnya pemerintahan terhadap distribusi sumber daya
Proses Reformasi Konstitusional	<ul style="list-style-type: none"> • Pengaruh dari oposisi yang kuat
Yurisdiksi Pemerintahan Terpilih	<ul style="list-style-type: none"> • Eliminasi pemerintahan yang otoriter • Mengurangi hak prerogatif militer
Hambatan Politik	<ul style="list-style-type: none"> • Kecilnya partisipasi • Permisifnya hukum terhadap pemilih dan Partai Politik
Aliansi dan Perpecahan Politik	<ul style="list-style-type: none"> • Lemahnya <i>Continuist Party</i> • Fragmentasi dan polarisasi Sistem kepartaian

Sumber: (Haggard, Stephen Kaufman, 1995)

Dalam teorinya ini, Haggard dan Kauffman membagi analisis dalam dua bagian. Pertama adalah dalam masa krisis ekonomi dan kedua ketika tidak dalam masa krisis ekonomi. Penulis dalam penelitian ini akan memakai teori Haggard dan Kaufman dalam masa krisis. Hal ini dikarenakan penulis melihat pentingnya peran krisis perekonomian dalam melihat kemenangan Macri dalam pemilu Argentina 2015.

Haggard dan Kaufman membagi teorinya menjadi 5 variabel dalam bagian krisis. Pertama, mereka melihat bagaimana adanya tantangan dari sebuah rezim dalam mempertahankan kekuasaannya. Pada bagian pertama ini, peran keadaan perekonomian menjadi sangat vital. Dari ketiga variabel yang diberikan Haggard dan Kaufman, yaitu rezim kehilangan elit bisnis, adanya protes massa dengan

motif ekonomi, dan perpecahan di dalam pemerintahan terhadap distribusi adalah turunan dari krisis ekonomi yang terjadi.

Kedua, oposisi yang semakin menguat dalam sebuah pemerintahan ketika adanya krisis ekonomi. Peran oposisi menurut Haggard dan Kaufman mempunyai peran yang sangat penting dalam membuat manuver-manuver politik untuk menjatuhkan sebuah kekuasaan. Oposisi memiliki keuntungan besar ketika krisis ekonomi terjadi di sebuah negara dikarenakan posisi mereka yang berada diluar pemerintahan yang dilanda krisis, dan dapat memberikan opsi serta solusi baru bagi masyarakat ditengah berkurangnya kepercayaan kepada pemerintahan yang sedang menjabat.

Ketiga dan keempat dalam variabelnya, Haggard dan Kaufman melihat peran dari militer dan partisipasi masyarakat dalam perpolitikan di sebuah negara. Haggard dan Kaufman menggunakan variabel ini dalam melihat perubahan rezim, dari otoritarian ke sistem demokrasi. Ketika krisis ekonomi melanda sebuah negara peran masyarakat dan militer dalam politik cukuplah vital. Kedua entitas ini, menurut Haggard dan Kaufman adalah aktor politik yang dapat menentukan sebuah rezim berganti atau tidak. Haggard dan Kaufman mengamati fenomena ini di beberapa negara di Asia seperti Indonesia, Thailand, dan Korea Selatan ketika dilanda krisis ekonomi tahun 1998.

Variabel terakhir yang menjadi basis teori Haggard dan Kaufman adalah sistem kepartaian yang ada dalam sebuah negara. Haggard dan Kauffman melihat peran dari partai yang memiliki yang memiliki platform politik yang sama dengan partai pemimpin sebelumnya (*Continuist Party*) dalam sebuah transisi.

Mereka berpendapat bahwa pergantian akan lebih mungkin untuk terjadi apabila tidaknya *continuist party* yang memiliki kekuatan yang cukup kuat untuk melawan oposisi.

Teori transisi politik oleh Haggard dan Kaufmann ini memberikan analisa yang sangat komprehensif dalam melihat perubahan politik di sebuah negara yang diakibatkan oleh krisis perekonomian. Peran ekonomi dalam transisi politik menurut Haggard dan Kaufman adalah sangat sentral. Teori ini telah berhasil mengelaborasi lebih lanjut beberapa perubahan politik di beberapa negara yang menjadi bahan penelitian dari Haggard dan Kauffman, seperti Chile pada masa Jendral Pinochet, Korea Selatan pada tahun 1987, serta Argentina pasca tragedi Falkland Island pada tahun 1982 dengan krisis ekonomi yang terjadi pada saat itu .

Dengan melihat variabel-variabel yang diberikan oleh Haggard dan Kaufman dalam teori ini, maka pergeseran yang terjadi dalam politik Argentina pada pemilihan Presiden tahun 2015 bersifat evolutif. Variabel-variabel yang dijadikan sebagai faktor analisis pergeseran dalam politik Argentina yang sebelumnya dikuasai oleh Justialist Party sejak tahun 1989 kemudian digantikan oleh koalisi partai sayap kanan pada tahun 2015, tidak terjadi hanya dalam satu waktu. Variabel terkait peran aktif masyarakat dalam proses politik, serta deaktivasi peran militer dalam politik telah terlebih dahulu terjadi. Variabel terkait krisis ekonomi, kuatnya oposisi, serta lemahnya *continuist party* terjadi mendekati pemilihan presiden 2015.

Keterlibatan dan kebebasan masyarakat dalam berdemokrasi, telah lama diterapkan di Argentina. Argentina adalah salah satu negara di kawasan Amerika Latin yang sudah lama menerapkan sistem demokrasi dengan tingkat partisipasi masyarakat yang cukup besar (Taylor, 1998). Perubahan terbesar terjadi pada masa presiden Raul Alfonsín. Pada masa pemerintahannya, Alfonsín menerapkan kebijakan yang mengkonsolidasikan seluruh partai dari semua ideologi untuk dapat berorientasi dengan sistem demokrasi yang baru. Alfonsín juga membuka keran kepada kelompok sipil dan serikat buruh untuk semakin aktif dalam proses demokrasi di Argentina (Maki, 2006). Hal ini diikuti dengan tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi, adanya penjadwalan yang jelas dalam masa pemilihan, sesuai dengan konstitusi yang ada, minimnya pelanggaran, serta tingkat penerimaan yang tinggi terhadap hasil elektoral (Alcantara, 1990). Tingkat partisipasi masyarakat dalam demokrasi cukup besar, menurut Freedom House, Argentina mendapatkan nilai 14/16¹ dalam konteks pluralisme dan partisipasi masyarakat dalam politik, serta mendapatkan nilai 14/16² dalam konteks kebebasan berpendapat (House, 2015).

Dalam hal peran militer dalam politiknya, Argentina berada dalam pemerintahan militer sejak kudeta pertama kali dilakukan oleh militer pada tahun 1930. Sejak saat itu, hanya Juan Peron yang menjadi Presiden yang terpilih dari proses pemilihan umum, meskipun Peron juga merupakan seorang militer. Namun kekalahan Argentina dari Inggris pada perang di Kepulauan Falkland dan semakin memburuknya perekonomian dibawah pemerintahan militer, berakibat dengan terpilihnya Raul Alfonsín dari partai Radical Civic Union yang merupakan non-

¹ Dalam survey yang dilakukan oleh Freedom House, angka tertinggi adalah 16.

² Dalam survey yang dilakukan oleh Freedom House, angka tertinggi adalah 16.

militer di pemilihan umum 1983. Beberapa undang-undang kemudian diloloskan untuk mengurangi peran militer dalam politik di Argentina. Diantaranya, menjadika menteri pertahanan yang berasal dari sipil, tidak memperbolehkan militer aktif masuk kedalam pemerintahan, serta pemangkasan anggaran militer (Hunter, *State and Soldier in Latin America : Redefining the Military Role in Argentina, Brazil, Chile*, 1996).

Variabel terkait ekonomi sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintahan Kirchner dengan pola perekonomiannya dianggap tidak mampu lagi untuk membawa Argentina keluar dari permasalahan ekonomi yang terjadi. Permasalahan ekonomi ini kemudian menjadikan pemilih untuk lebih percaya pada Macri dengan kebijakan perekonomiannya untuk keluar dari permasalahan ekonomi Argentina. Analisis terkait ekonomi ini akan melihat bagaimana kondisi ekonomi dapat mempengaruhi peta politik, dengan variabel yang protes masa, serta peran elit bisnis yang ada di Argentina.

Selain itu, penulis juga akan menganalisis lebih lanjut dampak dari oposisi yang terus menguat ketika krisis perekonomian terjadi di Argentina. Krisis ekonomi yang terjadi di Argentina memberikan peluang kepada oposisi untuk memberikan pilihan baru kepada masyarakat untuk dapat keluar dari krisis. Hal ini semakin diperkuat dengan dibangunnya koalisi partai sayap kanan yang berideologi neoliberalisme (*Cambiemeos*) untuk menjatuhkan pemerintahan Christina Kirchner. Koalisi Cambemeos menjadi oposisi yang cukup kuat untuk melawan Justicialist Party yang selama ini tidak Ménemui lawan politik yang cukup kuat. Pada tahun 2015, koalisi ini menguasai 109 dari 257 kursi parlemen,

JP hanya 72 kursi. Koalisi ini memilih Macri sebagai sosok yang dianggap mampu memberikan perlawanan yang hebat terhadap calon yang berasal dari JP.

I.8 Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis melihat pentingnya data-data dan juga analisis yang dapat menunjang tulisan ini guna menjawab bagaimana pengaruh krisis pada pergeseran politik di Argentina. Maka pada penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan melakukan analisis deskriptif terhadap kata-kata tertulis, studi literatur, serta nantinya diolah dan dianalisis untuk mengambil kesimpulan. (Sarwono, 2006). Dalam melakukan penelitian ini, penulis akan menggunakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik penelitian pustaka. Disini penulis akan melihat dan menelusuri dan mempelajari berbagai dokumen, jurnal, buku, berita, laporan yang memiliki hubungan dengan rumusan masalah yang diteliti oleh penulis (Umar, 2012)

Dalam penulisan ini, data yang didapat oleh penulis berasal dari sumber primer serta juga berasal dari sumber sekunder. Sumber primer yang akan menjadi data penulis adalah hasil-hasil laporan yang dikeluarkan oleh pemerintah atau instansi terkait dari negara Argentina yang berkaitan dengan rumusan masalah penelitian ini. Data sekunder penulis berasal dari jurnal-jurnal, berita, serta data-data yang dikeluarkan oleh badan-badan yang meneliti permasalahan ekonomi dan politik Argentina. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah bersifat deskriptif. Setelah data dikumpulkan, maka kemudian data akan diolah menjadi sebuah kesimpulan yang dapat menjawab rumusan masalah penulis. (Lezi, 2011)

Proses Penelitian

Proses penelitian adalah menyangkut perencanaan atau langkah dalam melakukan riset, dimulai dari pra riset sampai laporan penelitian. Pentingnya prosedur ini adalah sebagai panduan bagi peneliti dalam melakukan riset. Oleh karena itu, riset ini akan dilakukan melalui beberapa prosedur:

1. Pra Riset

Pra riset mencakup kegiatan untuk persiapan riset. Ini termasuk: melihat hasil laporan terkait penelitian, membaca bahan bacaan yang sesuai dengan penelitian.

2. Pengambilan Data

Riset ini akan mendapatkan data dari sumber sekunder. Sumber sekunder akan dipilih dari berbagai media tertulis, mencakup: majalah berkala, buku teks akademis, pernyataan resmi pemerintah Argentina dan publikasi, dan surat kabar harian. Pemilihan sumber sekunder didasarkan pada reputasi kredibilitas media / penerbit dan hubungannya dengan topik riset.

3. Analisis Data

Setelah mengumpulkan data, tahap penting berikutnya adalah menganalisis data. Langkah-langkah dalam menganalisa data diambil dari analisis data dalam rancangan riset kualitatif. Langkah-langkahnya adalah:

- a. Mengorganisir dan menyiapkan data

Langkah pertama ini berfokus pada mengumpulkan semua data yang dikumpulkan dari semua sumber.

b. Membaca semua data

Untuk memahami data yang dikategorikan, semua data perlu dibaca secara menyeluruh. Selama proses ini dimungkinkan untuk melakukan penyesuaian beberapa elemen data. Saat membaca data, langkah pertama adalah membaca bahan dengan cepat. Tujuan dari proses ini adalah memilih materi terkait dan mengidentifikasi pernyataan atau argumen terkait.

c. Pengkodean

Proses pengkodean melibatkan upaya pelabelan data tertentu dalam riset. Kisaran kode dapat dikembangkan selama proses analisis.

d. Mengaitkan tema/deskripsi

Fase ini melibatkan proses penggambaran kategori dan tema. Kategori dan tema diidentifikasi selama proses pengkodean. Fase ini juga bertujuan untuk menemukan korelasi antara tema dan kategori.

e. Interpretasi arti

Tahap terakhir dalam menganalisa data yang telah dikumpulkan dalam riset ini adalah untuk menafsirkan makna data. Interpretasi adalah tindakan menjelaskan sesuatu, dalam hal ini adalah catatan wawancara dan dokumen terkait.

BAB II

TRANSISI POLITIK ARGENTINA : DARI MILITERISME KE DEMOKRASI SERTA PERKEMBANGANNYA

Berlandaskan pada penjelasan yang telah dibangun dalam latar belakang dan landasan teori pada bab sebelumnya, bab ini akan berupaya melihat bagaimana perubahan rezim kepemimpinan Argentina, dari partai sayap kiri dan digantikan dengan kepemimpinan koalisi tengah-kanan dengan krisis ekonomi sebagai faktornya. Analisis dalam tulisan ini bersifat evolutif, dan penulis akan membagi analisis menjadi dua bagian.

Pertama, penulis akan menganalisis peranan militer dalam politik Argentina, serta peranan masyarakat dalam konteks kebebasan politik dan demokrasi. Perubahan ini terjadi pada tahun 1983, dengan faktor krisis ekonomi yang diakibatkan oleh Perang Malvinas. Krisis ekonomi ini berujung pada perubahan kekuatan politik di Argentina yang sebelumnya dikuasai oleh militer. *Kedua*, bab ini juga menjelaskan bagaimana perubahan peta politik pada tahun 1983 ini mempengaruhi pemilihan-pemilihan umum setelahnya.

II.1 Militer dalam politik Argentina

Demikian halnya dengan negara-negara Amerika Latin pada umumnya, militer dan politik di Argentina merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan. Militer merupakan elemen penting dalam menganalisis peta politik Argentina. Peran militer sangat strategis dalam politik sejak awal pembentukannya. Pembentukan angkatan bersenjata Argentina terjadi pada 1806 ketika kelompok milisi dibentuk untuk memerangi invasi Inggris ke Rio de la Plata (sebuah daerah

di selatan Argentina sekarang). Setelah kemenangan pertamanya, pasukan milisi berhasil melawan invasi Inggris kedua pada tahun 1807. Perang kedua dikenal sebagai "Revolusi Mei" yang merupakan awal perang kemerdekaan dan menyebabkan pengembangan *Primera Junta*, sebuah kelompok pasukan militer yang diperintahkan memerintah Buenos Aires. Kepemimpinan Junta ini kemudian merasa perlu untuk mengembangkan kekuatan militer yang terorganisir sehingga dapat mempertahankan wilayah tersebut, dan mengeluarkan keputusan pada tanggal 29 Mei 1810, menciptakan militer gabungan di Argentina (Little, 1984) .

Meski telah sukses dalam perang melawan tentara Inggris dan Spanyol, Junta Militer Argentina sangat terpecah dan tidak memiliki kepemimpinan yang jelas secara internal. Pada tahun 1812, dengan kedatangan José de San Martín yang berpengalaman menjadikan kekuatan militer Argentina pada saat itu semakin kuat. San Martín menciptakan Resimen Mounted Grenadiers (*Regimiento de Granaderos a Caballo*) untuk mengalahkan pasukan Spanyol pada Pertempuran San Lorenzo pada tahun 1812. San Martín juga menciptakan Angkatan Darat Andes (*Ejército de los Andes*) dan memimpin gerakan pembebasan di Peru dan Chili. Akhirnya, pada tahun 1816, provinsi-provinsi Argentina mendeklarasikan kemerdekaan dari Spanyol. (Gabriela Nouzeilles, Graciela Montaldo, 2002)

Dampak penjajahan panjang yang dilakukan oleh Spanyol dan Portugal terhadap institusi dan pola politik Amerika Latin begitu terlihat, termasuk di Argentina. Perpolitikan di Amerika Latin menjadi paternalistik, hierarkis, otoriter, katolik, korporatis, personalis, dan elitis. Meskipun setelah revolusi melawan Spanyol antara tahun 1810 dan tahun 1824 telah membuat negara-negara di

Amerika Latin menjadi sebuah negara yang modern, pada abad ke-20 banyak sikap, kepercayaan, dan sentimen fundamental yang ditanamkan Spanyol atau Portugis selama penjajahan 300 tahun berdampak secara signifikan terhadap tradisi politik yang absolutis, hierarkis, dan birokratis-patrimonial (Johnson, 1962).

Militer Spanyol dan Portugal yang berkembang di Argentina pada abad ke-15 dan ke-16 adalah kelompok militer yang berasal dari ordo, kasta, yang memiliki hak istimewa sebagai pasukan militer, dan memberi mereka status dalam kehidupan politik. Budaya militer tersebut membuat sebuah sistem yang menggambarkan polarisasi kekuatan terhadap segala macam bentuk kebijakan, sehingga mengakibatkan sedikit ruang untuk konsensus dan kompromi dalam proses pembuatan kebijakan. Warisan Iberian yang kuat dan tahan lama ini, sering dipandang bertentangan dengan gagasan pemerintah yang demokratis dan representatif. Karakteristik budaya Hispanik yang dominan pada dasarnya tidak berubah. Masalah bangsa biasanya diselesaikan dengan kekuasaan dan kekerasan.

Pola ini kemudian berkembang dan menjadikan militer sebagai bagian dari "trinitas suci", sebuah bentuk kekuasaan yang ada dalam masyarakat Amerika Latin, tentara, gereja, dan bangsawan (Wiarda, 1974). Militer di Amerika Latin kemudian menerima mandat yang lebih luas dalam fungsi-fungsi politik; membela negara, memelihara ketertiban internal, menjamin hak konstitusional, dan menegakkan hukum. Nilai-nilai ini kemudian menjadi hal yang penting dalam militer, di mana militer melihat dirinya sebagai pelestari dan pembela patriotisme dari setiap bahaya yang dirasakan. Oleh karena itu, legitimasi militer bukan hanya

dinilai sebagai nilai politik yang sudah turun-temurun, namun juga sebagai sebuah bentuk menyelamatkan negara.

Pada tahun 1960-an dan 1970-an, militer menggunakan legitimasi ini untuk menjadikan mereka sebagai kekuatan politik yang dapat memutuskan kebijakan strategis terkait kepentingan nasional sebagaimana yang termaktub dalam Doktrin Keamanan Nasional. Legitimasi ini dapat dianggap sebagai salah satu elemen penting dari hubungan militer dan politik, di luar tugas utama mereka sebagai penjaga keamanan negara. Dalam doktrin keamanan negara tersebut, militer di Argentina meyakini paham “politik antipolitisme,” kepercayaan bahwa takdir dari suatu negara dan bangsa terlalu penting untuk diserahkan kepada liku-liku politik sipil yang partisan dan politisi yang tidak kompeten. Pandangan ini, dalam konteks yang lebih ekstrim menjadikan militer sebagai kekuatan penyelamat negara. Militer yang "murni, kuat, dan patriotik", sebagai penyelamat bangsa, terlalu mudah disandingkan dengan penduduk sipil yang "korup, banci, dan kosmopolitan" (Wiarda, 1974).

Sampai tahun 1930-an, institusi militer di Argentina relatif tidak bersifat politis dengan sebagian besar fokus berpusat pada pengembangan kelembagaan dan profesionalisme militernya. Namun, pada tanggal 6 September 1930, pasukan militer yang dipimpin oleh Jenderal José Félix Uriburu menggulingkan pemerintah Hipólito Yrigoyen dalam sebuah kudeta pertama yang dikenal oleh para pendukungnya sebagai Revolusi September. Kudeta 1930 menandai dimulainya serangkaian enam kudeta militer (1930, 1943, 1955, 1962, 1966, dan 1976) di Argentina yang memberi militer kontrol atas pemerintah. Hanya dua

presiden yang menyelesaikan masa kepresidenan mereka selama abad ke-20, keduanya adalah Jenderal Agustín P. Justo dan Kolonel Juan Domingo Perón.³

Pemerintahan Jenderal Agustín Pedro Justo (1932-38), Roberto Ortiz (1938-42) dan Ramon Castillo (1942-43) mendukung kebijakan ekonomi anti-liberal, mengadopsi model pembangunan industrialisasi substitusi impor yang berusaha untuk melindungi industri domestik sambil meningkatkan peran militer dalam ekonomi Argentina. Hal ini menyebabkan militer terus menginternalisasi gagasan bahwa ruang lingkup tanggung jawab atau tugas militer termasuk pembangunan sosial ekonomi.

Momen penting lainnya untuk angkatan bersenjata Argentina adalah kudeta militer Maret 1976 yang menggulingkan istri ketiga Juan Perón, María Estela Martínez de Perón, yang dikenal sebagai Isabel Perón. Pergerakan ini dipimpin oleh Jenderal Jorge Rafael Videla, Admiral Emilio Eduardo Massera dan Brigadir Jenderal Orlando Ramón Agosti. Junta menggunakan nama resmi *Proceso* (Proses Reorganisasi Nasional) sebagai nama pemerintahan mereka, pemerintahan kemudian di pimpin oleh Jenderal Videla dan Junta berkuasa hingga 1983.

Pada masa ini, Junta militer memiliki kemampuan untuk menghapus presiden dari jabatannya, memantau serta menilai keadaan nasional Argentina. Tujuannya adalah memastikan kedaulatan politik, memperkuat tradisi nasionalis, meningkatkan peran Argentina di politik dunia, mengubah struktur ekonomi, menegaskan nilai-nilai moral dan budaya yang dianggap penting, dan

³ Perón kemudian digulingkan pada tahun 1955 dalam masa jabatan enam tahun keduanya.

menekankan NSD (National Security Defense). Militer memusatkan perhatiannya pada keamanan internal sebagai ancaman keamanan nasional, dan menegaskan dirinya sebagai penjaga moral, sebuah konsep yang telah digunakan oleh Perón dan dirancang untuk meningkatkan posisi politik angkatan bersenjata dan sebagai penyelamat negara di masa krisis ekonomi, politik, dan sosial (Pion-Berlin, 1989).

Tujuan dari *Proceso* adalah untuk membasmi para teroris, terutama ERP dan Montoneros; dan untuk membangun ekonomi yang kuat. Tujuan-tujuan ini harus dilakukan dengan cara apapun yang diperlukan, termasuk penggunaan kekuatan dalam menindas dan memaksa para kelompok yang dianggap sebagai penentang program ekonomi pemerintahan *Proceso*, kebijakan ini dikenal dengan *Dirty War*. Dalam kebijakan ini Junta bertanggung jawab atas penangkapan ilegal, penyiksaan, pembunuhan dan / atau penghilangan paksa sekitar 30.000 orang. Pembunuhan terjadi di dalam negeri di Argentina melalui penembakan massal. Selain itu, sebanyak 12.000 tahanan dari mereka yang tidak dihukum melalui proses hukum, dan ditahan di jaringan 340 kamp konsentrasi rahasia yang berlokasi di seluruh Argentina (C.Wright, 2007).

Kebijakan *Proceso* yang dijalankan oleh pemerintahan junta militer memperlihatkan bagaimana hak asasi manusia sangat dikesampingkan. Sehingga banyak pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia yang dilanggar oleh militer dengan berdasarkan kebijakan *proceso* yang dianggap bagian dari keamanan nasional negara. Selama masa *Proceso* pula, media mengalami represifitas yang sangat tinggi. Media sering kali diarahkan oleh junta militer untuk terus memperkuat posisinya dalam politik.

Masuknya militer dalam politik di Argentina serta menguasai pemerintahan telah melemahkan peran sipil dalam demokrasi di Argentina. Praktis, sejak tahun 1930 tidak ada representasi masyarakat sipil yang berhasil memimpin Argentina sebagai Presiden. Praktik politik militer dengan berbagai macam dogmanya berhasil memberikan kekuatan bagi mereka untuk dapat terus menjadi penguasa dalam politik Argentina. Hal ini juga mengakibatkan tingkat partisipasi masyarakat di Argentina sangatlah minim. Meskipun proses pemilihan terjadi, namun peran aktif masyarakat sipil sebagai sebuah kekuatan politik tidaklah kuat.

II.2 Transisi Politik

Proses kejatuhan dari pemerintahan junta militer Argentina berawal pada tahun 1982 ketika Junta militer membuat keputusan untuk menyerang pulau-pulau Malvinas dengan tidak memperhitungkan dampak ekonomi dan tidak memperhitungkan Inggris akan menanggapi penyerangan tersebut dengan sangat masif. Militer menderita kekalahan yang dahsyat sebagai akibat berbagai kesalahan dalam penilaian, strategi, dan operasi militer. Masalah ini juga bertambah besar, dengan terciptanya faksi di dalam tubuh militer. Militer terbagi menjadi dua, *Hardliners* (Perwira militer yang menginginkan peran besar militer dalam politik Argentina), serta *Softliners* (Perwira militer yang menginginkan adanya pengurangan dari peran militer dalam politik, dan mengalihkannya kepada sipil). Lebih penting lagi, keadaan ekonomi Argentina masa perang dan pasca perang semakin memperburuk situasi politik yang ada.

Transisi pemerintahan dari Presiden Jorge Rafael Videla mengalihkan pemerintahan kepada Roberto Viola pada akhir Maret 1981 terjadi pada saat

Argentina sedang di ambang krisis ekonomi. Pada tahun 1980 dan 1981, Argentina sangat rentan terhadap gejolak-gejolak ekonomi eksternal. Kebijakan ekonomi domestiknya menjadi tidak konsisten akibat perpecahan di dalam internal militer, dan berbagai kebijakan ekonomi pada masa itu yang membuat peso semakin *overvaluasi*, munculnya permasalahan *account defisit*, dan utang luar negeri tumbuh dengan sangat cepat. Pada akhir 1980, utang luar negeri Argentina telah mencapai tepat di bawah USD 10 miliar, dua kali lipat empat tahun sebelumnya (A.Fozzi, 1988).

Permasalahan ekonomi pertama yang muncul adalah krisis perbankan. Krisis ini dimulai pada bulan April 1980 ketika Bank Sentral harus campur tangan di tiga bank swasta terbesar di Argentina. Bank-bank tersebut mengalami kerugian besar akibat beberapa kebijakan bank yang sangat berisiko dan juga terkadang ilegal. Ketiga Bank itu adalah *Banco de Intercambio Regional (BIR)*, *Banco Oddone*, dan *Banco de los Andes*, sementara beberapa bank kecil dan perusahaan keuangan yang telah dilikuidasi sebelumnya. Konsekuensi dari runtuhnya ketiga bank besar ini sangatlah penting, hal ini dikarenakan mereka adalah salah satu bank terbesar dalam sejarah Argentina.

Masalah ini kemudian diperparah dengan faksi-faksi internal militer yang menyebabkan ketidakpastian dalam hal politik dan penanganan ekonomi. Naiknya Viola ke tampuk kekuasaan presiden terjadi ditengah perpecahan di dalam internal militer menjadikan hilangnya kepercayaan pada masa depan pemerintahan junta dan menyebabkan pelarian modal yang begitu besar. Lebih dari USD 10 miliar modal keluar dari Argentina dari awal 1980 dan Maret 1981. Ini sebanding

dengan 60% utang luar negeri selama periode yang sama dan menyamai 80% dari total hutang luar negeri swasta di akhir Maret 1981 (A.Fozzi, 1988).

Perpecahan yang mendalam antara faksi-faksi yang ada dalam pemerintahan militer juga merupakan salah satu alasan penting bagi kehancuran ekonomi dan gejolak politik selama periode 1981–82, serta awal rencana penyerangan Kepulauan Malvinas. Faksi-faksi ini kemudian menjadi kendala yang cukup besar ketika peralihan kekuasaan terjadi dari Videla ke pemerintahan Viola, yang sering dikatakan sebagai sebuah kudeta internal militer yang sangat berpengaruh kedepannya. Ketidakstabilan politik dan ekonomi membuka pintu bagi para garis keras militer yang ingin mewujudkan impian lama mereka, untuk merebut kembali Kepulauan Falkland/Malvinas yang disengketakan dari Kerajaan Inggris.

Hal ini kemudian menjadi kenyataan ketika Invasi Argentina ke Kepulauan Malvinas pada tanggal 2 April 1982, hanya beberapa jam setelah Britania Raya memberi tahu Dewan Keamanan PBB bahwa pasukan invasi Argentina sedang menuju ke kepulauan Malvinas. Margaret Thatcher mengumumkan bahwa *British Aircraft Carrier Invincible* akan berlayar pada 5 April untuk memimpin perang dengan empat puluh kapal ke Atlantik Selatan.

Peperangan yang sangat sengit di Samudera Atlantik ini mengakibatkan kapal *General Belgrano* milik Argentina rusak dan tenggelam. Setelah tenggelamnya kapal penjelajah *General Belgrano* pada tanggal 4 Mei 1982, pasukan Argentina hanya memiliki sedikit peralatan berat dan tidak ada satu pun tank yang mereka miliki selama pertempuran untuk menguasai dua pulau utama.

Kerugian paling banyak dirasakan oleh angkatan bersenjata Argentina adalah rusaknya pesawat tempur dan helikopter yang ditembak jatuh. Manuel Solanet, Sekretaris Keuangan selama konflik, memperkirakan kerugian material berjumlah sekitar USD 900 juta (CIA, 2007).

Dampak langsung dari perang tersebut memang tergolong besar, namun dampak tidak langsungnya lebih memberatkan ekonomi Argentina. Pengaruh larangan dan sanksi keuangan yang dikenakan oleh Inggris jauh lebih berat bagi ekonomi Argentina. Perdagangan dengan Inggris, Selandia Baru, dan Kanada terhenti total. Hal ini juga diikuti dengan diberlakukannya larangan dagang oleh *European Community* dengan Argentina. Ekspor ke negara-negara tersebut turun 18% dibandingkan tahun sebelumnya, serta turun dua pertiga pada Juni dan lebih dari 80% pada bulan September. Sanksi ini juga diikuti oleh negara-negara lain seperti Jepang, Spanyol, dan US yang ikut dalam sanksi perdagangan ini. Sanksi finansial yang diterapkan Inggris terhadap Argentina ini mengakibatkan Argentina mengalami kendala dalam mengakses pasar modal, yang mengakibatkan Argentina selama perang tersebut secara de facto dinyatakan *default* (gagal bayar) (CIA, 2007).

Kekalahan militer dari tangan Inggris dalam Perang Malvinas meninggalkan negara dalam keadaan krisis ekonomi. Argentina memiliki USD 36 miliar hutang luar negeri dan menjadi salah satu yang tertinggi di dunia pada masa itu. Sementara tingkat inflasi yang tinggi juga melanda negara itu. Rezim militer kemudian didiskreditkan di mata masyarakat sipil dengan banyak penduduk yang mengkritik militer senior yang bertanggung jawab atas perang. Kekalahan di Malvinas ditambah dengan krisis ekonomi serta perpecahan internal

dari militer akhirnya menyebabkan runtuhnya rezim militer dan kembali ke pemilihan demokratis pada tahun 1983. Kembalinya Argentina sebagai negara yang demokratis menandai berakhirnya peran militer yang mendominasi politik Argentina sejak 1930.

II.3 Demiliterisasi dan Demokrasi di Argentina

Transisi Argentina sebagai negara demokrasi yang terjadi pada tahun 1983, tepat dengan berakhirnya pemerintahan junta militer seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Demokratisasi Argentina merupakan bagian dari gelombang demokratisasi yang merentang tahun 1974 hingga 2001 (*Third wave of Democratisation*). Periode ini ditandai dengan meredanya masa perang dingin, dekolonisasi, demiliterisasi, sereda hilangnya budaya-budaya politik yang sebelumnya ada (P.Huntington, 1991).

Naiknya Alfonsín dalam tampuk kekuasaan pada tahun 1983, memberikan semangat baru bagi demokrasi Argentina. Selain melakukan demiliterisasi dalam politik Argentina, Alfonsín juga berupaya untuk memperkuat pondasi bagi kebebasan politik sipil serta penyelesaian atas kasus-kasus HAM yang terjadi selama masa pemerintahan Junta Militer. Secara umum dalam langkah mendemokratisasikan sebuah negara, langkah-langkah transisi yang harus diambil adalah seperti, penguatan hak-hak sipil dasar yang melindungi individu dari penguasa, dan mengizinkan warga untuk berkompromi untuk mempengaruhi partisipasi dalam pemerintahan. Dalam tingkat masyarakat, pemerintah yang demokratis sangat tergantung pada kepercayaan publik, atau pada kesediaan publik pada ketidakpastian prosedur demokratis (Norden, 1990) .

Pada masa transisi, 13 partai politik nasional bersaing secara ketat dalam berbagai level dalam pemilihan pada pemilu 1983. Namun, dari ketiga belas partai yang bersaing ini, hanya dua yang memiliki kesempatan untuk memperoleh kursi kepresidenan; *Justicialist Party* (Peronis) dan *Unión Cívica Radical* (UCR). Kedua partai ini kemudian menawarkan Dr. Raul Alfonsín (UCR) dan Italo Luder (JP) sebagai kandidat mereka dalam pemilihan Presiden. Pemilihan ini juga diikuti kandidat lain seperti, mantan Gubernur Buenos Aires, Oscar Alende (*Intransigent Party*) dan seorang ekonom Rogerio Julio (*Integration dan Development Movement*). Pemilihan Presiden ini kemudian dimenangkan oleh Alfonsín, dengan suara sebesar 51%, berbanding 40% dari peringkat kedua calon dari JP, Italo Luder (Little, 1984).

Alfonsín mempunyai massa yang cukup kuat saat pemilihan tersebut. Raúl Alfonsín merupakan pemimpin salah satu faksi dalam Partai Radikal, *Renovación y Cambio* (Pembaruan untuk Perubahan). Faksi ini didukung penuh oleh sebuah gerakan pemuda dan mahasiswa yang memiliki pengaruh yang cukup kuat dalam perlawanan terhadap junta militer. Mereka merupakan sebuah kelompok yang banyak berfokus pada hak asasi manusia, dan Alfonsín sendiri merupakan seorang sosok yang sering menyuarakan hak demokrasi dan hak asasi manusia khususnya terkait dengan peran militer dalam “*Dirty War*”.

Setelah meraih kemenangan, dalam pidato pertamanya sebagai presiden Argentina pada tahun 1983, arah pemerintahan Alfonsín adalah untuk merestorasi demokrasi dan hak-hak sipil yang tidak ada di era pemerintahan junta militer, serta mengembalikan kekuatan ekonomi Argentina yang hancur sejak kekalahan di Perang Malvinas. Dalam pidatonya, Alfonsín secara gamblang memperlihatkan

bahwa demokrasi tidak bisa sejalan dengan militer. Alfonsín ingin menggambarkan bahwa adanya militer dalam politik, bukanlah bagian dari demokrasi, dan demokrasi adalah bagian dari masa depan Argentina yang lebih baik. Berikut adalah kutipan pidato kenegaraan Alfonsín (Gabriele, 2013):

Con la Democracia se come,
Con la Democracia se educa,
Con la Democracia se cura,
No necesitamos nada mas,
Que nos dejen de mandonear,
Que nos dejen manejar la patria financiera,
Que nos dejen de manejar minorías agresivas,
totalitarias, inescrupulosas,
Que por la falta de votos, buscan las botas para
manejar al pueblo Argentino.

Dengan Demokrasi kita makan,
Dengan Demokrasi kita berpendidikan,
Dengan Demokrasi kita bisa menyembuhkan,
Kita tidak membutuhkan apapun lainnya,
Berhenti menekan kami,
Mari kita mengatur ekonomi kita,
Mari kita mengatur keagresivitasan, ketotaliteran,
yang kekurangan dukungan untuk memerintah
masyarakat Argentina (Gabriele, 2013)

Pidato ini kemudian sejalan dengan pola kebijakan yang dibangun Alfonsín setelah dilantik. Bagi Alfonsín kondisi paling mendasar untuk merestorasi demokrasi adalah dengan tidak adanya intervensi militer. Selama pemerintah militer tetap menjadi pilihan yang realistis dan selama pengaruh militer melebihi daripada institusi negara yang lain, maka demokrasi akan terus berjalan di tengah-tengah ketidakpastian. Hal ini kemudian dibuktikan dengan proses demiliterisasi yang dilakukan oleh Alfonsín.

Setelah menjabat sebagai Presiden Argentina pada 10 Desember 1983, pemerintahan Alfonsín langsung bergerak untuk memastikan adanya revisi dalam hal hubungan militer dan politik serta hubungan antara sipil dan militer secara konstitusional dan pengembalian hak-hak sipil. Terkait masalah itu, Alfonsín

menerapkan dua kebijakan yaitu *Reforma Militar* (reformasi militer) dan *Revisi de del Pasado* (peninjauan kembali masa lalu). Kedua kebijakan ini dimaksudkan untuk membuat sebuah aturan hukum terhadap legitimasi otoritas sipil atas militer secara konstitusional, dan demokratis (Little, 1984).

Hal pertama yang dilakukan oleh Alfonsín dalam hal posisi militer dalam politik, adalah menjadikan Kementerian Pertahanan sebagai sebuah kekuatan sipil. Dalam kebijakan ini, Alfonsín melihat pentingnya menjadikan kementerian tersebut untuk dipimpin oleh seorang sipil dan menjadikan kementerian ini berada di atas ketiga angkatan bersenjata. Akibatnya, langkah-langkah awal yang diambil oleh pemerintahan Alfonsín adalah upaya untuk merevisi rantai komando yang ada di dalam angkatan bersenjata, sehingga otoritas komando yang dimiliki oleh komandan panglima tertinggi akan dimiliki oleh Presiden yang didelegasikan kepada Menteri Pertahanan. Lebih lanjut, Alfonsín memberikan wewenang kepada Kementerian Pertahanan sebagai pengambil kebijakan terkait pemilihan terhadap kepala staf angkatan bersenjata disetiap angkatan bersenjata.

Hal ini dapat dilihat dari kebijakan Alfonsín dalam menunjuk Kepala Staf Gabungan yang baru dan tiga Kepala Staf dari masing-masing angkatan. Alfonsín menunjuk Brigadir Jenderal Julio Fernández Torres sebagai Kepala Staf Gabungan, diberikan yang meskipun pada saat pengangkatannya Julio merupakan junior dari Kepala Staf Angkatan Udara yang baru, Mayor Teodoro Waldner. Tindakan ini diambil dengan maksud yang jelas bahwa tidak ada "panglima tertinggi" selain presiden. Perubahan-perubahan ini dirancang untuk Ménempatkan kontrol operasional dari angkatan bersenjata di tangan

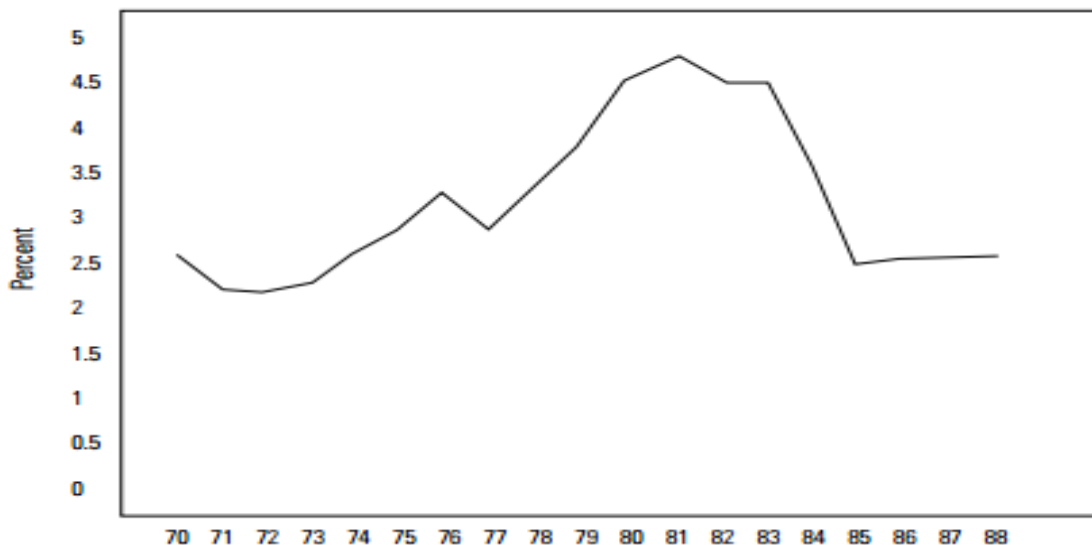
pemerintahan sipil. Selain itu, nominasi dan perubahan dalam penugasan semua pejabat kelas kolonel dan di atasnya sekarang berada ditangan Menteri Pertahanan, promosi ini juga masih memerlukan persetujuan senat.

Selain menjadikan sipil sebagai pimpinan dalam Kementerian Pertahanan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, Alfonsín juga berupaya untuk menjadikan institusi militer hanya sebagai kekuatan yang hanya mengurus masalah keamanan dari luar dan keluar Argentina, bukan sebagai kekuatan yang mengurus masalah dalam negeri Argentina. Kebijakan ini kemudian tertuang dalam *Argentina National Defense Law* yang resmi menjadi undang-undang pada 1988. Kebijakan ini tergolong lama untuk kemudian menjadi sebuah undang-undang dikarenakan telah dirancang sejak tahun 1985. Hal ini dikarenakan meskipun tidak lagi memimpin Argentina sebagai presiden, kekuatan militer masih ada di parlemen Argentina ditambah Justicialist Party yang menjadi oposisi dan punya sejarah yang kuat dengan militer, sehingga terjadi proses tarik ulur dalam pembuatan kebijakan ini. (Hunter, *Redefining the Military's Role in Argentina, Brazil, and Chile*, 1996).

Dalam kebijakan ini, perubahan terbesar terdapat pada pembatasan militer yang hanya diperbolehkan mengurus ancaman eksternal. Sebelum undang-undang ini dikeluarkan, militer memiliki tanggung jawab untuk mengatasi ancaman-ancaman yang ada di dalam Argentina, termasuk ancaman politik. Dalam undang-undang baru ini, bahkan militer dilarang untuk masuk dalam mengurus ancaman seperti narkoba dan juga terorisme dan sekarang menjadi tanggung jawab dari pihak kepolisian.

Dengan diberlakukannya undang-undang ini, militer secara konstitusional dihilangkan haknya untuk mencampuri urusan politik negara. Hal ini mengakhiri polemik kekuasaan yang selama ini terjadi antara sipil dan militer. Meskipun tetap menjadi sebuah kekuatan politik, namun militer telah resmi dikesampingkan dalam hal politik praktis di Argentina. Ini memperkuat kontrol sipil terhadap militer dengan mengalihkan fokus militer dari masalah-masalah politik dan doktrin berkewajiban untuk campur tangan ketika keadaan memburuk. Upaya ini dinilai berhasil, dan meskipun ada empat pemberontakan, tiga di bawah Alfonsín dan satu di bawah Carlos Ménem, namun tidak ada yang berusaha menggulingkan pemerintah.

Alfonsín juga membuat kebijakan yang mengakibatkan militer sangat tertekan, yaitu pemotongan atas anggaran militer. Motif politik untuk melemahkan militer ini diperkuat insentif ekonomi untuk memotong anggaran militer dan dengan demikian mengurangi inflasi dan juga utang negara yang meningkat sejak kekalahan di Perang Malvinas. Angkatan bersenjata Argentina mendapatkan 32,3% dari sebagai belanja sektor publik pada tahun 1982, dibandingkan dengan 18,4% pada tahun 1990. Pengeluaran militer mencapai USD 9,2 milyar pada tahun 1982 dan turun menjadi USD 4,9 milyar pada tahun 1989. Pemerintah mengurangi personel militer dari 175.000 menjadi 95.000. Dengan mengamankan dan melaksanakan kontrol atas anggaran militer adalah cara utama untuk mengubah hubungan sipil-militer (Hunter, *Redefining the Military's Role in Argentina, Brazil, and Chile*, 1996).



Gambar 2.1: Rasio Anggaran Militer Argentina terhadap GDP (Hunter, Redefining the Military's Role in Argentina, Brazil, and Chile, 1996)

Dalam grafik diatas, dapat dilihat bagaimana fluktuasi dari anggaran yang diterima oleh militer. Militer mendapatkan anggaran 4,7% pada tahun 1981 dari total PDB negara dan merupakan fase anggaran tertinggi yang ditujukan untuk militer. Gambar 2.1 ini mencerminkan kemampuan militer untuk memperoleh sumber daya baik dan untuk menekan kampanye antisubversif selama masa 1976-1979. Jumlah ini kemudian turun pada titik terendah pada tahun 1985 hingga 1988 pada angka 2.5% dari total PDB Argentina pada masa itu. Angka ini menunjukkan bahwa Alfonsín berhasil menekan anggaran militer sebagai bentuk pelemahan kekuatan politik militer.

Militer langsung merasakan dampak yang signifikan dari pemotongan anggaran ini. Satu hal yang paling merasakan dampaknya adalah gaji dari perwira militer yang dipotong sangat besar. Di bawah pemerintahan Alfonsín, militer mendapatkan gaji yang sama dengan sipil sesuai dengan jabatan yang didapatnya.

Jenderal militer akan mendapatkan gaji yang sama dengan Ketua Mahkamah Agung dan juga Kepala Polisi.

Dampak dari pemotongan anggaran di dalam tubuh militer juga mempengaruhi jumlah perwira militer yang ada di Argentina. Memang, salah satu tujuan Alfonsín untuk mengurangi anggaran belanja ini, akan mengurangi banyaknya perwira militer pada jangka panjang. Banyaknya anggota militer secara normal adalah 115.000 dari tiga angkatan bersenjata. Selama pemerintahan *Proceso*, untuk melawan ancaman dan juga memperkuat militer dari segi personel, totalnya naik menjadi 178.000. Pada tahun 1983, tahun sebelum rezim Alfonsín, perwira militer 119.000 ini termasuk yang menjadi korban di perang Malvinas. Selama masa pemerintahan Alfonsín, penurunan personel militer ini terus terjadi. Setelah tahun 1984, wajib militer bagi laki-laki mengalami pengurangan hampir 55%, mencapai titik terendah 24.921, lalu naik mendekati 30.000. Oleh karena itu, pada akhir periode pemerintahan Alfonsín pada 1988, ukuran total angkatan bersenjata diperkirakan mencapai 78.000, atau sekitar 60 persen dari kekuatan normal mereka sebelumnya.

Selain demiliterisasi, dampak *Proceso* yang terjadi selama masa pemerintahan Junta militer sejak 1976 sampai 1983, telah membawa Argentina ke dalam masa yang begitu kelam dalam hal penegakan hak asasi manusia. Alfonsín merasa rekonsiliasi atas apa yang terjadi selama *Proceso* harus dijalankan agar Argentina dapat keluar dari masa kelam untuk masuk ke dalam era demokrasi. Alfonsín melihat pentingnya peran rekonsiliasi untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap masa depan politik Argentina yang humanis dan demokratis.

Tiga hari setelah menjabat, Alfonsín mengeluarkan Dekrit nomor 158, dan menyerahkan kepada Dewan Tertinggi Angkatan Bersenjata dan pengadilan militer tertinggi, sembilan anggota dari tiga junta militer yang telah membentuk pemerintahan *Proceso*. Mereka harus diadili di bawah yurisdiksi militer untuk pembunuhan, penahanan ilegal, dan penyiksaan. Pada bulan Januari, keputusan serupa dikeluarkan untuk Jenderal Ramón Camps, yang merupakan target nomor satu untuk pelanggaran hak asasi manusia yang diduga dilakukan saat ia menjadi Kepala Polisi Provinsi Buenos Aires (C.Wright, 2007).

The recent military dictatorship brought about the greatest and most savage tragedy in the history of Argentina. Although it must be justice which has the final word, we cannot remain silent in the face of all that we have heard, read and recorded. This went far beyond what might be considered criminal offences, and takes us into the shadowy realm of crimes against humanity. Through the technique of disappearance and its consequences, all the ethical principles which the great religions and the noblest philosophies have evolved through centuries of suffering and calamity have been trampled underfoot, barbarously ignored (CONADEP, 1984).

Alfonsín kemudian membentuk Komisi Nasional Orang Hilang (Comisión Nacional Sobre la Desaparición de Personas, atau CONADEP), untuk mengumpulkan bukti untuk mendukung bahwa militer selama operasi-operasi yang antisubversif telah melakukan program represi yang luas atas dasar ideologis terhadap rakyat-rakyat sipil yang tak berdosa, bukan hanya sebagai perlawanan dari pergerakan gerilya seperti dijadikan alasan oleh petinggi militer saat itu. Komisi ini bertugas untuk mengumpulkan data dari narasumber-narasumber yang selamat serta keluarga dari korban *Proceso*, serta dari pemerintah junta militer yang memimpin pada masa itu. Dalam laporannya, yang berjudul *Nunca Mas* (Jangan pernah lagi), CONADEP mengestimasi sekitar 30.000 orang berusaha untuk dihilangkan, adanya sekitar 340 kamp-kamp konsentrasi.

Dalam hal penegakan demokrasi, transformasi politik yang dilakukan oleh Alfonsín adalah mengkonsolidasikan partai-partai politik dari berbagai ideologi untuk mengkonsolidasikan jaringan partai mereka dan mereorientasikannya dalam struktur demokrasi yang baru. Justicialist Party, yang pada masa itu masih memiliki “dendam politik” yang besar ketika Presiden Isabel Peron dikudeta oleh militer, awalnya tidak mendukung penuh kebijakan ini. Hal ini juga kemudian yang menjadikan Alfonsín kesusahan untuk merealisasikan kebijakan ini, ditambah pada saat itu partai Alfonsín, UCR, bukanlah partai mayoritas dalam perlemen Argentina. Namun pada akhirnya JP mendorong Upaya Alfonsín untuk menstabilkan politik Argentina melalui cara-cara demokratis, yang berujung dengan mulusnya pergantian Presiden tahun 1988, dari Raul Alfonsín ke Saul Ménem.

Alfonsín yang merupakan seorang pegiat gerakan-gerakan kelompok sipil kemudian mendorong organisasi kelompok-kelompok sipil dan munculnya kembali serikat pekerja dalam upaya untuk menyediakan stabilitas bagi demokrasi yang baru berkembang dan mencegah munculnya kembali kekuasaan militer. Setelah kemenangan Alfonsín terjadi kebangkitan aktivisme politik, khususnya oleh individu kelas bawah dan menengah. Banyak orang Argentina yang tumbuh dewasa di bawah kekuasaan militer dengan antusias bergabung dengan partai-partai politik untuk mempromosikan cita-cita demokrasi (Maki, 2006).

Selama periode ini, media-media yang ada di Argentina mengalami kemajuan yang signifikan sebagai struktur independen dan dapat bekerja tanpa hambatan dan dapat membantu pengembangan masyarakat sipil serta dorongan penegakan demokrasi. Selama masa periode pemerintahan junta militer, media di

Argentina sangat disensor. Kebijakan ini merupakan bagian dari kebijakan militer Argentina untuk melemahkan kelompok-kelompok sipil yang dianggap subversif terhadap pemerintahan junta. Media dapat diperalat sedemikian rupa oleh militer untuk menguatkan posisinya.

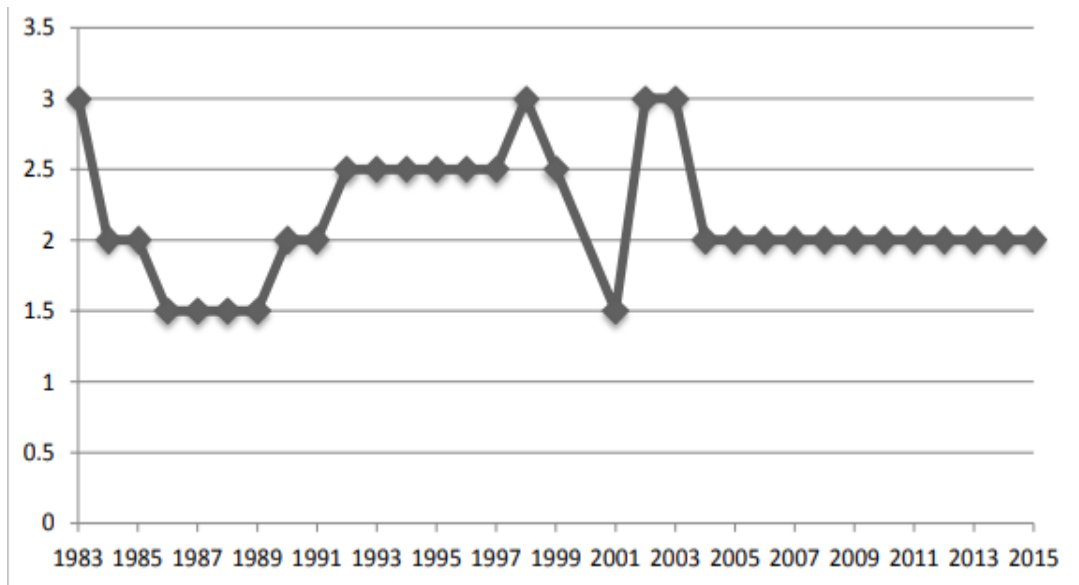
Selepas transisi politik yang mulus yang terjadi pada tahun 1998, ketika untuk pertama kalinya perpindahan kekuasaan terjadi secara demokratis dan bebas dari Alfonsín ke Ménem, Ménem kemudian membuat sebuah kebijakan yang merubah tatanan demokrasi di Argentina. Pada tahun 1994 pemerintahan mengamandemen undang-undang pasal 43 yang disetujui oleh kubu Ménem dan kubu Oposisi yang dipimpin oleh Alfonsín. Amandemen ini semakin memperkuat sistem Presiden, dan semakin membuka keran demokrasi di Argentina.

Isi dari Amandemen yang dianggap penting untuk pondasi demokrasi yang kuat di Argentina adalah; 1. Argentina meratifikasi kedaulatannya yang sah; 2. Setiap undang-undang internasional tentang hak asasi manusia dan setiap Perjanjian Internasional lainnya sudah diratifikasi atau akan diratifikasi oleh Argentina, dianggap memiliki status yang setara dengan Konstitusi sebagai hukum tertinggi; 3. Panjang masa jabatan presiden dipersingkat dari enam menjadi empat tahun dan persyaratan presiden harus seorang Katolik Roma dihapus. Pemilihan presiden dari sebelumnya dilakukan secara tidak langsung oleh lembaga pemilihan umum menjadi pemilihan langsung. Lama masa jabatan senator juga dipersingkat, dari sembilan menjadi enam tahun. Juga ditetapkan bahwa setiap distrik akan memilih tiga senator (naik dari dua sebelumnya) oleh pemilihan langsung (bukannya dipilih oleh legislatif provinsi). 4. Ibu kota negara, Buenos Aires, diberi status khusus Kota Otonom (Ciudad Autónoma), dan

penduduknya diberi hak untuk memilih seorang Kepala Pemerintahan yaitu Walikota (Center for Latin Americas).

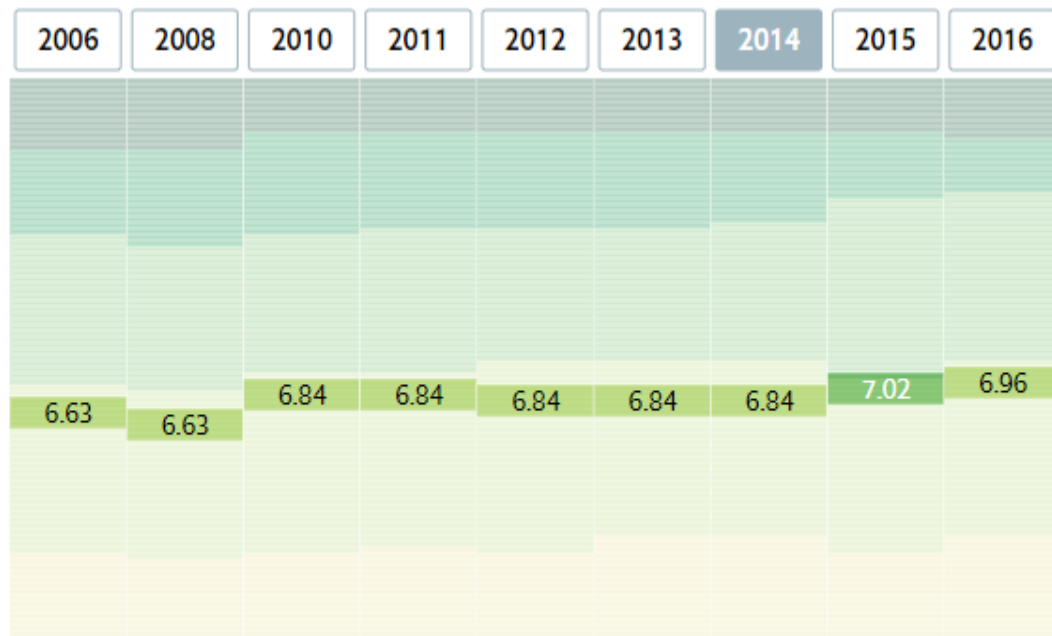
Dengan diberlakukannya amandemen ini, maka politik di Argentina menjadi sangat bebas dan terbuka. Undang-undang ini memberikan masyarakat sebuah kepastian hukum tentang bagaimana demokrasi di Argentina bisa dijalankan. Amandemen ini kembali memperkuat pondasi demokrasi di Argentina yang menjanjikan bagi kedaulatan rakyat dan masyarakat sipil. Dengan dibukanya pintu demokrasi ini, maka tingkat partisipasi masyarakat pun semakin meningkat. Peningkatan ini dapat dilihat sejak naiknya Alfonsín dan kemudian disambung oleh Ménem.

Dalam data yang dikeluarkan oleh Freedom House, dengan melihat faktor kebebasan berpolitik, kebebasan terhadap hak sipil, serta tingkat kebebasan secara umum. Indeks Freedom House menilai tingkat kebebasan sipil dan tingkat hak politik di negara tertentu pada skala 1-7 dengan yang terbaik dan tujuh adalah yang terburuk. Sejak Argentina kembali menjalani konstitusi yang demokratis pada 1938, Argentina mengalami tingkat kebebasan tertinggi pada 1986, 1987, 1989, dan 2001 dengan skor 1,5 dan mengalami tingkat kebebasan terendah pada tahun 1998, 2002, dan 2004. Tren ini kemudian stabil sejak tahun 2005 sampai dengan pemilihan presiden terakhir pada 2015 (House, 2015).



Gambar 2.2: Argentina Freedom Index 1983-2015 (House, 2015)

Mirip dengan Freedom House, Economist Intelligence Unit juga mengeluarkan penelitian terkait dengan Indeks Demokrasi, yang menilai negara-negara pada skala 0-10, dengan 0 merupakan tingkat demokrasi yang rendah dan 10 merupakan tingkat demokrasi tertinggi. Peringkat ini didasarkan pada: “proses pemilihan dan pluralisme; kebebasan sipil; fungsi pemerintahan; partisipasi politik; dan budaya politik "dan peringkat digunakan untuk mengklasifikasikan rezim menjadi empat jenis: demokrasi penuh, demokrasi cacat, rezim hibrida, dan rezim otoriter (Economist, Democracy Index).



Gambar 2.3: Indeks Demokrasi Argentina (Economist, Democracy Index)

Meskipun Economist Intelligence Unit tidak memberikan gambaran waktu yang sama dengan Freedom House, namun hasil dari kedua data ini memperlihatkan bagaimana tingkat partisipasi serta tingkat demokrasi di Argentina memasuki masa sangat baik. Data ini mempertegas bahwa demokrasi di Argentina berada di jalur yang begitu baik. Naiknya Alfonsín dan diikuti oleh Ménem memberikan sebuah dampak yang cukup signifikan terhadap kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi pulihnya demokrasi di Argentina khususnya dalam konteks demokrasi elektoral.

Dari pemaparan yang telah dijelaskan di atas, maka dapat dilihat secara jelas bagaimana pergeseran politik di Argentina dari yang sebelumnya dikusai oleh junta militer digantikan oleh kelompok sipil dalam koridor demokrasi nasional terjadi setelah Argentina dilanda permasalahan maupun krisis ekonomi, sebagaimana diuraikan dalam Gambar 2.2, meskipun militer telah berkuasa begitu

lama, dan memiliki legitimasi yang tinggi dari masyarakat, namun dampak dari faktor politik internal militer, Perang Malvinas serta buruknya perekonomian selama mereka memimpin Argentina memberikan kesempatan kepada kelompok sipil untuk mengambil alih kekuasaan.

Faktor krisis ekonomi dalam perubahan konstelasi politik pada sebuah negara, seperti yang telah dipaparkan oleh Haggard dan Kaufman, tergambar jelas oleh pergantian kekuasaan di Argentina tahun 1983. Dengan adanya gejolak dalam perekonomian menjadikan militer Argentina semakin lemah dalam konteks politik elektoral, dan masalah ini terus menggerus suara dan dukungan terhadap militer. Di sisi lain pihak oposisi yang dalam konteks ini politisi sipil yang menginginkan perubahan politik dari militer ke pemerintahan sipil, semakin kuat karena mendapatkan keuntungan elektoral.

Dampaknya secara politik, masyarakat sebagai pemilih yang menginginkan perubahan dalam politik dan menginginkan adanya perbaikan ekonomi dan politik, akan mengalihkan kepada pilihan-pilihan alternatif yang ada pada saat pemilihan. Pada tahun 1983, masalah yang muncul adalah adanya kebijakan *Proceso* yang dilakukan oleh pemerintah junta sangat merugikan masyarakat sipil. Kebijakan ini sama sekali tidak mempertimbangkan hak asasi masyarakat sipil. Kondisi ini mengakibatkan Alfonsín yang merupakan pegiat HAM adalah sebuah pilihan yang sangat rasional, meskipun JP memiliki basis yang cukup besar namun masih terafiliasi nama besar Peron yang merupakan militer. Dari fenomena ini penulis melihat bahwa pemilih di Argentina cenderung memilih kekuatan politik yang melawan *status quo* murnisejak pemilihan presiden pada tahun 1983 khususnya saat terjadinya krisis ekonomi. Hal ini terlihat dari

terpilihnya Ménem dengan konsep ekonomi yang berbeda dari Alfonsín yang dianggap tidak mampu menata ekonomi Argentina, dan dilanjutkan dengan terpilihnya Néstor Kirchner dengan program ekonomi yang berbeda pula dari Ménem saat terjadinya krisis ekonomi di Argentina tahun 2001.

Tabel 2.1: Pemicu dan Proses Pergantian Rezim di Argentina

Rezim yang Berkuasa			Pemicu Pergantian Rezim	
Tahun	Tipe Pemerintahan (Demokrasi/Otoritarian)	Presiden	Pemicu	Proses
1930-1943	Demokrasi illiberal	Yrigoyen	The Great Depression (Devaluasi peso hingga 60%, PDB turun 14%, defisit perdagangan)	Kudeta militer
1955-1966	Otoritarianisme Birokratis	Juan Peron, Arturo Frondizi, Umberto Illia	Krisis ekonomi (Kegagalan Five Year Plan Peron. Inflasi 25,8%, hutang negara mencapai USD 160 juta, defisit perdagangan)	Kudeta militer
1966-1973	Otoritarianisme Birokratis	Juan Carlos Roberto Ongonia, Levingston, Juan Peron, Isabel Peron, Jorge Videla, Roberto Viola, Reynaldo Bignone	Permasalahan ekonomi (Kegagalan liberalisasi ekonomi dan banyaknya kudeta membuat politik tidak stabil, inflasi mencapai 21%, Devaluasi Peso)	Kudeta militer
1976-1983	Otoritarianisme Birokratis	Jorge Videla, Roberto Viola, Reynaldo Bignone	Permasalahan ekonomi (Perang malvinas, gagal bayar hutang, hutang USD 36 juta, Inflasi di atas 10 Persen)	Pemilihan Umum
1983-1989	Demokrasi Liberal	Raul Alfonsín	Permasalahan ekonomi (Overvaluasi Peso, Krisis ekonomi Meksiko, gagal bayar hutang IMF)	Pemilihan Umum
1990-2001	Demokrasi Liberal	Ménem, De la Rúa	Krisis Ekonomi (pertumbuhan ekonomi hanya 0,5%, Kemiskinan meningkat)	Pemilihan umum

hingga 54%, gagal bayar hutang IMF, Hutang mencapai 45% dari PDB.)

Sumber: (Hoffer, 2017) (Kronfelt, 2015), (Carlos, 1990)

Dampak dari perang Malvinas yang berakibat pada hancurnya ekonomi Argentina yang telah membawa Alfonsín seorang politisi dengan basis kelompok penegakan HAM sebagai presiden Argentina, memberikan sebuah pondasi demokrasi dan struktur politik yang sangat baik bagi pemilihan umum serta dinamika politik di Argentina. Melalui kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Alfonsín dan dilanjutkan oleh Ménem, telah memastikan masyarakat sipil dengan berbagai latar belakang ideologi politik dapat bersaing secara demokratis dalam setiap perhelatan politik Argentina.

Demiliterisasi telah memberikan legitimasi politik bagi masyarakat sipil sebagai Presiden Argentina. Legitimasi politik bagi sipil setelah naiknya Alfonsín dan proses demiliterisasinya berperan penting dalam dinamika politik. Terbukti setelah naiknya Alfonsín, Presiden Argentina selalu dijabat oleh masyarakat sipil, tanpa adanya kudeta yang terjadi. Demiliterisasi juga memberikan proses politik yang stabil dengan pemerintah dan oposisi dapat mencapai kekuasaan dengan cara konstitusional. Kebijakan-kebijakan ini sangat berpengaruh dalam pemilihan-pemilihan berikutnya, termasuk pada pemilihan presiden Argentina tahun 2015.

Pada bab selanjutnya penulis akan menganalisis perubahan politik di Argentina tahun 2015 dengan menggunakan variabel terkait peran Krisis ekonomi, peran oposisi, dan *continuist party*. Ketiga variabel ini terjadi dalam kurun waktu yang relatif dekan dengan pemilihan presiden tahun 2015. Krisis ekonomi yang terjadi sejak 2012, munculnya koalisi oposisi *Cambiemos*, serta

lemahnya koalisi pemerintahan dianggap sebagai faktor perubahan politik di Argentina tahun 2015. Selain ketiga variabel tersebut, penulis juga akan mengaitkannya dengan kebijakan-kebijakan demiliterisasi dan demokratisasi yang telah dijelaskan pada bab ini.

BAB III
DINAMIKA POLITIK OPOSISI, KEKUASAAN PEMERINTAH,
DAN PERKEMBANGAN EKONOMI

Pada bab sebelumnya telah dijelaskan bagaimana terjadinya perubahan politik di Argentina pada tahun 1983 dengan menggunakan variabel militer, dan demokrasi serta partisipasi masyarakat. Pemilihan Alfonsín pada tahun 1983 juga membawa dampak yang sangat besar bagi politik dan demokrasi di Argentina dan mempengaruhi pemilihan-pemilihan presiden setelahnya termasuk pemilihan Presiden Argentina tahun 2015. Bab sebelumnya memberikan gambaran bagaimana proses perubahan politik Argentina yang disebabkan oleh krisis ekonomi yang melanda negara tersebut, dan memberikan landasan analisis tentang bagaimana krisis ekonomi berpengaruh besar dalam perubahan politik di Argentina.

Bab ini penulis akan menganalisis perubahan politik Argentina yang terjadi pada tahun 2015 dengan menggunakan variabel krisis ekonomi, lemahnya *continuist party* dan menguatnya oposisi. Dalam bab ini penulis akan menjelaskan bagaimana *Justicialist Party* (JP) menguasai perpolitikan Argentina sejak tahun 1989. Penulis kemudian akan menganalisis bagaimana perubahan politik di Argentina yang sebelumnya dikuasai oleh JP berganti dengan koalisi tengah-kanan, *Cambemos* yang beraliran neoliberalisme, dengan permasalahan ekonomi sebagai faktornya.

III.1 *Justicialist Party* dalam Politik Argentina dan kekalahan Pemilihan Presiden 2015

Politik di Argentina tidak dapat dipisahkan daripada pengaruh seorang Juan Domingo Perón, mantan Presiden Argentina yang berkuasa dari tahun 1946 hingga 1955 dan 1973 sampai 1974. Pada tahun 1943, sekitar 300 perwira nasional, salah satunya adalah Kolonel Juan Domingo Perón, menciptakan *Group of United Official (GOU)* dengan tujuan menentang pencalonan Partai Konservatif Patra Costas. Peron memainkan peran utama dalam kudeta militer yang menggulingkan Presiden Ramon Castillo pada bulan Juni 1943. Dimulai pada akhir 1943, Peron menggunakan posisinya sebagai sekretaris tenaga kerja untuk membangun basis dukungan di kalangan pekerja perkotaan dan kelas bawah. Ia mendapatkan dukungan ini melalui perluasan hubungan serikat pekerja dan pekerja. Setelah kudeta tahun 1943, Perón diangkat sebagai Menteri Perang dan menciptakan aliansi untuk meningkatkan jumlah perwira militer yang bergabung dengan GOU dan menciptakan jaringan kader yang setia. Perón dengan cepat menjadi pemimpin gerakan massa yang sangat besar yang dikenal sebagai *peronismo* pada tahun 1945, dan terpilih sebagai Presiden pada tahun 1946 (Wiarda, 1974). *Peronismo* ini menjadi cikal bakal berdirinya *Justicialist Party (JP)* (Partai Peronis) nantinya.

Gerakan Peronisme ini semakin berkembang dan menjadikan golongan tenaga kerja sebagai basisnya. Kemunculan kelompok Peronis memang memiliki kaitan yang erat dengan meningkatnya kelas pekerja industri. Pada tahun 1930-an dan 1940-an, industrialisasi dan migrasi dalam skala besar telah menjadi pintu masuk pondasi bagi cepatnya pertumbuhan kelas buruh Argentina. Kelangkaan tenaga kerja, emigrasi dari Eropa, dan produksi besar-besaran dan beberapa pusat

industri menciptakan identitas kelas buruh yang kuat. Kemunculan Peronisme diikuti dengan kebangkitan kelas pekerja industri.

Peronisme menonjolkan hubungannya yang erat dengan kelas buruh dan gerakan serikat buruh. Kekuatan lembaga-lembaga serikat buruh yang diciptakan oleh Perón dan kekuatan ikatan emosional antara kelas pekerja dan Perón menjadikan peron semakin menguat sebagai kekuatan politik baru.

Pemilihan yang dilaksanakan pada Februari 1946, menciptakan peluang untuk pembentukan partai berbasis tenaga kerja yang kuat di Argentina. Pemimpin dari beberapa serikat buruh mendirikan Partai Buruh sebagai sarana penyaluran dukungan kelas pekerja kepada Peron dan kemudian berhasil mengantarkan Peron sebagai Presiden selama periode 1946 sampai 1955. Para pemimpin serikat pekerja yang mendirikan Partai Buruh termasuk ketua Partai Buruh, Luis Gay dari serikat pekerja telepon dan wakilnya Cipriano Reyes dari serikat pengepakan daging yang ingin menjadikan partai ini sebagai partai berbasis tenaga kerja seperti yang banyak berkembang di Eropa waktu itu. Waktu itu, di Eropa, serikat buruh akan secara kolektif mengafiliasi anggotanya, mengoperasikan cabang lokal, dan pemimpinnya akan menikmati posisi hegemonik dalam kepemimpinan nasional (Torre, 1998). Partai Buruh ini kemudian berganti nama menjadi Partai Peronis (PP).

Berbeda dengan Partai Buruh yang berkembang di Eropa pada masa itu, yang secara kolektif berafiliasi dengan anggota serikat dan menjamin pemimpin serikat pekerja dengan posisi istimewa dalam kepemimpinan, PP tidak memiliki mekanisme formal partisipasi tenaga kerja (Partido Peronista 1948). Partai Peronis

tidak memiliki hierarki yang stabil dan bahkan aturan dan prosedur yang dirutinkan secara minimal untuk menyusun hubungan otoritas internal, kepemimpinan dan pemilihan kandidat, atau partisipasi serikat pekerja.

Pada 16 September 1955, angkatan bersenjata yang dipimpin oleh Jenderal Eduardo Lonardi melancarkan pemberontakan selama 4 hari dalam upaya penggulingan dan pengasingan Presiden Peron. Kantor Partai Peronis ditutup dan Partai Peronis dilarang untuk mengikuti kompetisi elektoral. *General Labor Confederation (CGT)* dan banyak anggota serikat diintervensi dan dimusnahkan. Pergerakan peronisme dilarang untuk melakukan politik dan Peron sendiri diasingkan selama delapan belas tahun. Dalam masa ini, Peronisme bergerak secara diam-diam dan tetap melakukan pergerakan politik dengan basis serikat dagang yang tidak dihilangkan oleh pemerintahan saat itu (Levitsky, 2003).

Pergerakan massa peronis setelah 1955 terjadi secara *bottom-up*, dan dilakukan secara desentralisasi (tidak terpusat pada sebuah otoritas secara nasional). Pergerakan awal atas perlawanan Peronis ini bersifat inisiatif spontan dari massa peronis, yang kemudian disebarkan ke massa Peronis lainnya dan dilakukan tanpa adanya kepemimpinan yang koheren, dan bersifat nasional. Meskipun gerakan ini stabil sebagai sebuah gerakan massa, namun organisasi ini hanya dianggap sebagai ikatan semu dari berbagai kelompok yang setia kepada Peron oleh kekuatan politik diluar Peron (*Radical* dan *Militer*). Organisasi pergerakan Peronis ini berbeda dengan organisasi kepartaian karena mereka tidak memiliki struktur otoritas yang menyeluruh dengan otoritas untuk mengkoordinasikan sub-unitnya atau membuat keputusan yang mengikat semua

anggota dalam gerakan. Sebaliknya, sub-unit cenderung mengatur diri mereka secara mandiri, dan sebagai hasilnya, setiap sub-unit cenderung mengembangkan gaya sendiri, dan memiliki gagasan berbeda tentang cara mencapai tujuan gerakan. hal ini kemudian menjadi sangat berpengaruh dalam perjalanan Partai Peronis nantinya.

Banyak dari massa Peronis yang kemudian bergabung dengan organisasi-organisasi lain, seperti *Comando de Organizacion (C de O)*, *Iron Guard*, *Monteneros*, *Peronist Youth (JP)*. Organisasi ini, memiliki gagasan dan tujuan yang berbeda satu sama lainnya, mulai dari revolusi sosialis (Montoneros) hingga revolusi kiri yang dioperasikan dengan otonomi kepemimpinan nasional (*C de O*). Partai-partai Neo-Peronis bersaing satu sama lain dan menggunakan nama resmi *Justicilist Party (JP)* untuk suara Peronis yang kemudian dipertahankan hingga sekarang.

JP yang mencul pada periode 1943 menjelma sebagai wakil politik yang dominan dari kelas pekerja dan kelas bawah. Terlepas dari upaya yang berulang-ulang dari pemerintah pasca-1955 untuk memberantas Peronisme dari gerakan buruh, serikat-serikat buruh Argentina tetap sangat loyal sebagai Peronis sepanjang akhir abad ini. Hegemoni atas suara pekerja ini dan kelas bawah yang menetapkan Peronisme sebagai kekuatan pemilu dominan Argentina, dengan pendukung yang stabil yang diperkirakan oleh para akademisi sekitar 30–50 % dari pemilih, dan dari keseluruhan pemilih JP, dan sebagian besar merupakan masyarakat miskin (Levitsky, 2003).

Sejak Argentina menerapkan sistem politik demokratis pada tahun 1983, Justicialist Party menjadi partai yang paling dominan dalam setiap perhelatan pemilihan presiden dan pemilihan umum. JP memulai hegemoninya dalam politik Argentina sejak memenangi pemilihan umum 1989, dan memenangi pemilihan presiden dengan Carlos Ménem sebagai Presidennya. Ménem berhasil membawa JP kembali memenangi kontestasi pemilihan presiden tahun 1995 dan menjadikan Ménem menjabat selama 2 periode. Kepemimpinan JP kembali dikuasi oleh Néstor Kirchner pada tahun 2002 dan dilanjutkan oleh istrinya Christina Fernandez de Krichner sampai tahun 2015.

Dalam parlemen, mulai 1983 sampai 2015, politik Argentina didominasi oleh dua partai besar, Justicialist Party (JP) dan Unión Cívica Radica (UCR). Selama periode 1989 sampai 2015, empat partai lainnya yang berhasil mendapat kursi di parlemen adalah *Unión del Centro Democrático* (UCEDE), *Frente País Solidario* (FREPASO), *Acción por la República* (AR), and *Afirmación para una República Igualitaria* (ARI), *Propuesta Republicana* (PRO) Civic Coalition (CC). UCEDE, AR, PRO diidentifikasi sebagai sayap kanan dalam spektrum politik, FREPASO dan ARI terletak di tengah-kiri (Saez, 2008).

Tabel 3.1: Persentase Persebaran Suara Parlemen Argentina

Partai Politik	Tahun Pemilihan				
	2005	2007	2009	2011	2013
Justicialist Party	54,9 %	49,4 %	30,80 %	40,85 %	29.43 %
Unión Cívica Radica	17,9%	32,7 %	3,30 %	12.78 %	5,98 %
<i>Unión del Centro Democrático</i>	3,9 %	1,6 %	-	-	-
Propuesta Republicana (PRO)	1,2 %	4,3 %	17,70 %	16.80%	9.0 %
<i>Civic Coalition (CC).</i>	3,2 %	7,8 %	19,80 %	15.69%	1,35 %
<i>Afirmación para una República Igualitaria</i>	4,3 %	5,1 %	2,0 %	3.2%	1,20 %

Sumber : (Saez, 2008) (Americas, 2011),

Berbeda dengan JP dan UCR, partai-partai nasional lainnya ini tidak pernah membentuk organisasi partai yang efektif dan terlalu bergantung pada popularitas seorang pemimpin tunggal. Selain itu, pihak-pihak ini secara konsisten gagal secara signifikan untuk meningkatkan dukungan dari wilayah yang menjadi basis suara mereka.

Hegemoni JP dalam peta politik Argentina terhenti pada tahun 2015 ketika JP dikalahkan oleh koalisi *Cambiemos*. Koalisi politik yang dibuat pada tahun 2015 ini terdiri *Propuesta Republicana (PRO)* (partai berideologi tengah-kanan yang dibentuk oleh Mauricio Macri, *The Radical Civic Union (UCR)*, and *The Civic Coalition-ARI*. Koalisi ini mengusung ideologi konservatif, neoliberalisme. Perkembangan koalisi dimulai dengan memanfaatkan sentimen anti-Kirchner yang berkembang dan dengan sukses besar menjaring dukungan sebagai kekuatan anti populisme. Koalisi ini kemudian menjadi kekuatan politik oposisi bagi JP sebelum masa pemilihan 2015 berlangsung.

Pemilihan 25 Oktober 2015 ini mewakili momen penting dalam sejarah politik negara. Setelah dua belas tahun pemerintahan yang populis, tengah-kiri, di bawah pemerintahan Néstor Kirchner dan Chistina Kirchner dibawah bendera JP, politik Argentina berganti haluan dengan dipimpin oleh koalisi partai tengah-kanan dibawah bendera *Cambiamos*. Calon Presiden dari kalangan Peronis, Daniel Scioli, meraup suara terkecil dalam pesta demokrasi Argentina sejak 1983 (37%), koalisi memperoleh 34% dari suara nasional pada pemilihan pertama. Pada pemilihan kedua tahun 2015, Macri berhasil mengungguli Scioli dengan raihan suara 51,34% berbanding 48,66%, dan menjadi Presiden dari kalangan non-peronis pertama sejak 2001 (Economist, Mauricio Macri's victory marks a shift away from populism for Argentina—and South America, 2015).

Pergeseran politik Argentina “ke kanan” dalam lanskap pemilihan Argentina tidak berkaitan dengan kandidat yang bertarung dalam pemilihan presiden. Baik Macri dan Scioli, keduanya adalah putra pengusaha kaya, dan hanya ada sedikit bukti bahwa portofolio kebijakan publik mereka sangat berbeda satu sama lainnya. Kedua calon ini sama-sama menginginkan perubahan infrastruktur yang lebih untuk menopang ekonomi, memilih melihat kasus pernikahan sesama jenis sebagai masalah keagamaan, serta menginginkan sistem edukasi yang lebih inklusif bagi seluruh masyarakat. Ayah Macri merupakan pegawai negeri pekerjaan umum dan kontraktor perumahan yang bekerja untuk negara Argentina, ayah Scioli adalah salah satu pemilik Saluran 9, jaringan TV yang sangat populer pada tahun enam puluhan dan tujuh puluhan. Keduanya dikenal publik melalui olahraga; Scioli adalah pembalap speed boat dan Mauricio Macri adalah presiden terpilih dari salah satu klub sepak bola paling populer di Argentina, Boca Juniors. Keduanya menghadirkan pengalaman

eksekutif, selama delapan tahun. Daniel Scioli adalah gubernur provinsi Buenos Aires, sementara Mauricio Macri telah memerintah kota Buenos Aires selama dua periode.

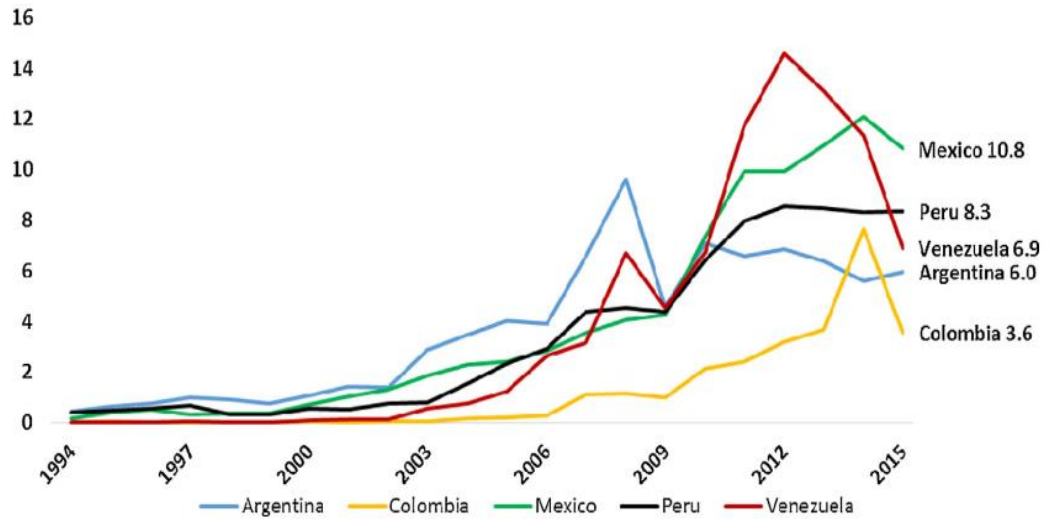
Penulis berpendapat bahwa sejumlah faktor menjelaskan kekalahan petahana di tingkat nasional. JP yang berkuasa menghadapi perpaduan antara kelelahan elektoral setelah lebih dari satu dekade berkuasa, dan memuncaknya tantangan ekonomi yang menciptakan permintaan anti-petahana. Dengan latar belakang ini, kombinasi dari oposisi yang bersatu dengan kampanye pemilihan yang sukses dan Peronisme yang terpecah menyebabkan kemenangan Mauricio Macri.

III.2 Ledakan Komoditas dan Populisme

Ketika "Gelombang merah muda" dari pemerintah yang berhaluan kiri di Amerika Latin naik ke tampuk kekuasaan disaat protes anti-neoliberal di Amerika Latin pada akhir 1990-an dan awal 2000-an, reaksi awal dari pemerintahan adalah mengganti arah kebijakan perekonomian di negaranya. Ketika partai-partai ini berjuang untuk mendapatkan suara masyarakat dengan mantra "*there is no alternative*" (slogan partai sayap kiri untuk mengganti neoliberalisme) banyak menaruh harapan pada gelombang baru ini dari alternatif yang ada untuk neoliberalisme. Pemerintah sayap kiri yang tergabung dari gelombang merah muda, termasuk Venezuela, Bolivia, Ekuador, Brasil dan Argentina, mencapai kemenangan elektoral di belakang ketidakpuasan populer yang meluas tentang efek neoliberalisme. Dengan demikian, dorongan utama proyek mereka adalah anti-imperialis dan anti-neoliberal. Termasuk dengan naiknya Néstor Kirchner sebagai Presiden Argentina pada tahun 2003, dengan membawa sentimen anti-neoliberalisme dalam pemerintahannya.

Sebagai tanggapan terhadap mobilisasi massa yang menginginkan perubahan, pemerintahan Kirchner langsung mengubah cara sebuah negara dalam mengatasi masalah ekonomi dari sebelumnya dikuasai mazhab neoliberalisme; mendorong ulang nasionalisasi perusahaan negara, mendorong pertumbuhan berdasarkan produksi daripada spekulasi, memulihkan kembali peran negara dalam redistribusi kekayaan, dan memperluas layanan publik, terutama dalam perawatan kesehatan, makanan, dan pendidikan. Tidak ada keraguan bahwa program-program sosial pemerintah gelombang merah muda ini membawa keuntungan yang signifikan bagi golongan miskin dan pekerja dan menjadikan kelompok ini sebagai basis suara bagi Kirchner (Villasenin, 2017). Banyak dari mereka untuk pertama kalinya mendapatkan akses ke barang-barang pokok, perumahan, pendidikan tinggi, dan perawatan kesehatan. Hal ini pula yang menguatkan para Néstor Kirchner dan istrinya untuk tetap berada di tampuk kekuasaan.

Pola kebijakan ini dapat berjalan dengan baik dikarenakan ada polarisasi pandangan tentang dampak pertumbuhan ekonomi Tiongkok di Amerika Latin. Beberapa berpendapat bahwa masa depan pembangunan ekonomi Amerika Latin saat itu sangat bergantung dari ledakan komoditas yang terjadi pada awal tahun 2000-an dan semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi Tiongkok. Ekonomi Afrika dan Amerika Latin tumbuh dengan begitu cepat tidak dapat dipisahkan dari meningkatnya ekonomi Tiongkok. Kemunculan Tiongkok telah membantu mendorong harga semua jenis bahan bakar, logam dan biji-bijian ke puncak baru selama hampir dua dekade terakhir (Gallagher, 2009).



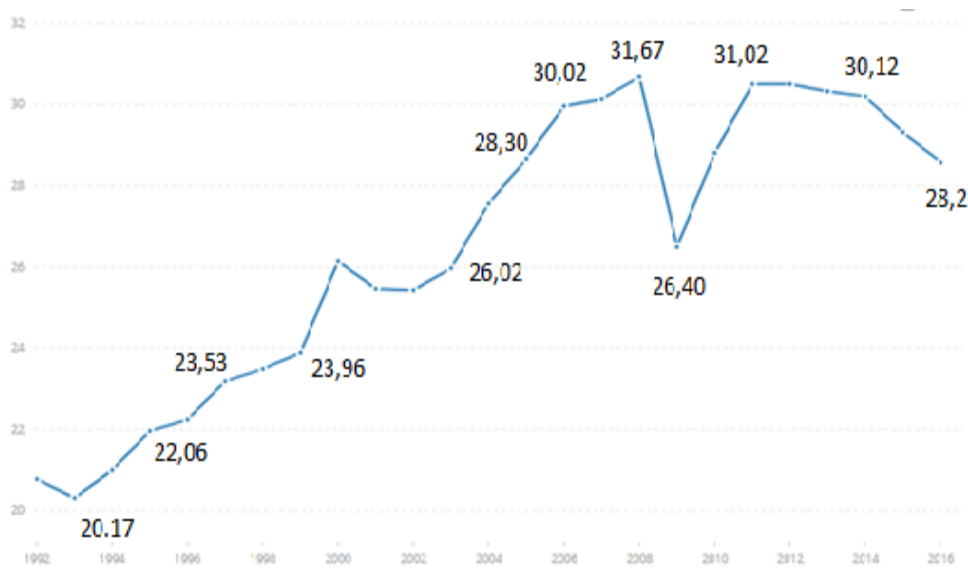
Gambar 3.1: Persentase Total Ekspor Negara Amerika Latin Ke Tiongkok dari Total Ekspor (Gallagher, 2009)

Meningkatnya korelasi antara pertumbuhan dua ekonomi Asia, Tiongkok dan India terhadap ekonomi di Amerika Latin didorong oleh eksternalitas permintaan dan harga yang lebih tinggi untuk komoditas jenis bahan bakar, logam dan bijian, yang merupakan komoditas unggulan negara Amerika Latin, memberikan manfaat bagi perekonomian negara Amerika Latin. Kelebihan permintaan tersebut, bahkan ketika perdagangan terkonsentrasi dalam jumlah yang kecil, permintaan kuat Tiongkok untuk bahan mentah tetap menjadi sebuah keuntungan bagi Amerika Latin. Dalam istilah ekonomi, kejadian ini dianggap sebagai permintaan kejutan yang positif. Terlebih lagi, ada dampak positif pada kawasan, meskipun perdagangan langsung dengan Tiongkok tidak terlalu tinggi.

Pada periode ini pula terjadi peningkatan perdagangan antara Tiongkok dan Argentina. Selama dekade terakhir, Tiongkok telah menjadi mitra komersial Argentina terbesar kedua, setelah Brasil. Menurut ECLAC, jumlah produk yang diekspor dari Argentina ke Tiongkok merupakan 85% dari total ekspor barang (58%

kedelai, 10% minyak kedelai) (ECLAC, 2010); artinya, sekitar 70% dari ekspor Argentina ke Tiongkok terkonsentrasi pada kedelai dan turunannya. Argentina sebagai salah satu eksportir daging sapi, kedelai, jagung, dan gandum terbesar di dunia, dengan kenaikan harga dan permintaan untuk komoditas tersebut telah menambah sumber pendapatan utama pemerintah. Negara banyak menghabiskan sebagian besar lonjakan pendapatan selama ledakan komoditas pada dekade ini untuk melunasi utang dan memberikan subsidi beberapa sektor dalam ekonomi, seperti pensiun, kesehatan.

Harga kedelai yang memuncak pada tahun 2004 sangat menguntungkan sektor ekonomi Argentina. Pada tahun 2006, harga komoditas dunia untuk gandum, kedelai dan minyak telah mencapai rekornya dalam sejarah. Lonjakan ini mencapai angka 52 % dari yang sebelumnya USD 218 per ton menjadi USD 317 per ton, Sebagai dampak dari memulihnya krisis ekonomi 2001 dan tumbuhnya perekonomian, investasi semakin besar. Pada masa ini Argentina dengan ekspor sebesar 70% sampai 80% dapat merasakan tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 8% - 9% dalam 5 tahun. Perubahan dalam produksi pertanian ini menciptakan sebuah kondisi ekonomi dalam pemerintahan Kirchner yang disebut "Populisme berorientasi ekspor." Dalam masa pemerintahan Kirchner, kedelai telah menggantikan daging sapi dan gandum sebagai komoditas utama ekspor Argentina. Orientasi ekspor ini memberikan kekuatan bagi populisme Argentina, dan kontribusi utama untuk pemulihan dan pertumbuhan ekonomi.

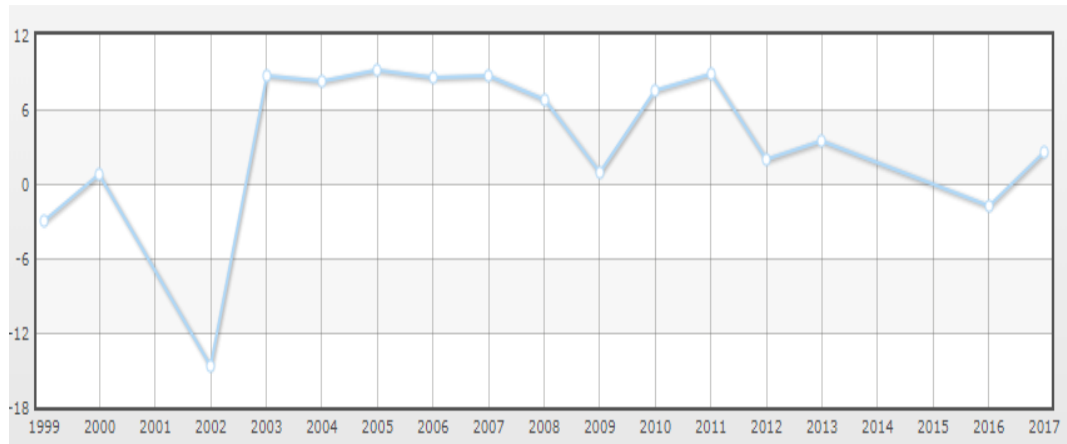


Gambar 3.2: Persentase Ekspor terhadap GDP Argentina (World Bank, 2018)

Selama masa pendapatan berbasis komoditas, pendapatan negara Amerika Latin naik rata-rata sekitar 4,75% dari PDB antara 2002 dan 2006 dan sebagian besar pertumbuhan ini disebabkan oleh faktor perdagangan. Argentina, Cile, dan Venezuela dengan 68,4 - 89 % ekspor mereka dalam bentuk komoditas primer, dari 2004 hingga 2007 mencatat tingkat pertumbuhan tahunan 7,4 hingga 8,5 %. Pada masa itu rata-rata pertumbuhan PDB tahunan antara 2003 dan 2007 sebesar 9% dan tingkat pengangguran yang menurun dari 21,7 % pada tahun 2003 untuk 9,9% di tahun 2007 di Argentina (ECLAC, 2010).

Berbagai faktor di atas menunjukkan bahwa Argentina menikmati peningkatan yang stabil dalam PDB setelah tahun 2003 yang berlanjut hingga tahun 2011. Pemulihan ekonomi ini menguntungkan nilai tukar yang mendorong produksi industri, dan subsidi umum yang meliputi produksi energi, transportasi, dan makanan. Tidak seperti upah barang-barang riil yang memicu inflasi di pasar domestik Argentina, kedelai sebagai barang-barang bebas upah tidak berpengaruh langsung pada upah kelas buruh. Jika konsumen domestik sensitif dengan perubahan harga di

barang-barang riil upah (anggur, daging sapi, dan sebagainya), kedelai bukanlah produk penting yang dikonsumsi Argentina. Ini adalah faktor kunci untuk administrasi Kirchner's untuk menjadi sukses dengan distribusi kekayaan (Calvo Ernesto, and M. Victoria Murillo., 2009)



Gambar 3.3: Persentase Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Argentina (World Bank, 2018)

Kinerja ekonomi memang menjadi faktor penentu bagi pemimpin populis yang harus selalu dikontrol. Jika kinerja ekonomi Argentina menurun, pemilih akan mulai melampiaskannya pada masalah-masalah lainnya seperti diantaranya korupsi, tata pemerintahan yang buruk dan inefisiensi sektor publik-yang mengancam popularitas pemimpin. Ledakan komoditas yang dimulai sejak tahun 2003 menjadi landasan kuat guna mempermudah Kirchner untuk menggunakan strategi populis. Mazucca (Mazucca, 2013) menggunakan istilah "populisme rente" yang menjelaskan bagaimana pemimpin ketergantungan pada sumber daya alam *export-oriented* untuk memerintah negaranya. Sama halnya Argentina ketergantungan pada rentier populisme seperti Ekuador, Bolivia dan Venezuela, dan peningkatan harga jual kedelai menunjukkan bahwa pemerintahan Kirchner adalah bagian dari populisme

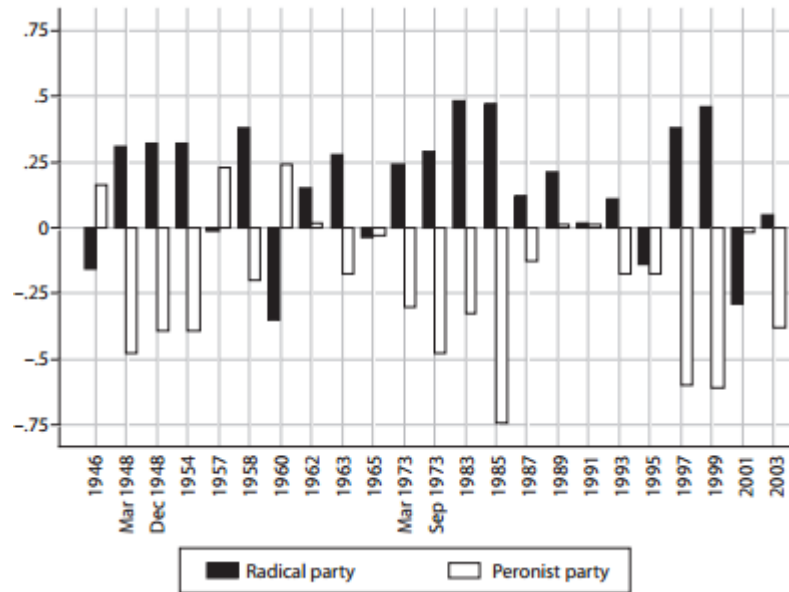
rente di Amerika Latin. Pergeseran dari *wage-goods* (sapi dan gandum) kepada budidaya *non-wage goods* (kedelai) memungkinkan pembentukan populisme berorientasi ekspor (Richardson, 2009).

Singkatnya, ekspor kedelai menjadi faktor penentu dalam pemerintah Kirchner. Dengan keadaan ini tidak hanya memberikan pendapatan pajak dan fiskal untuk mensubsidi masyarakat sebagai upaya untuk mengurangi kemiskinan, tapi juga meningkatkan upah minimal yang diperkuat dengan dukungan buruh. Lonjakan komoditas yang didapatkan oleh Kirchner digunakan untuk mengumpulkan modal dan membangun otoritas politik. Faktor politik yang paling membantu rezim Kirchner adalah menggabungkan banyak pelaku sosial dan mendirikan doktrin politik *kirchnerismo* yang dikenal dengan Klientelisme. Klientelisme adalah sebuah praktik politik, yang menggunakan barang (baik dalam bentuk uang dan jasa) sebagai bagian dari jual beli suara. Klientelisme ini menjadikan suara politik sebagai sebuah tindakan *take and give*, melalui beberapa aktor, seperti patron, dan broker dengan harapan akan mendulang suara yang tinggi. Praktik ini tidak terlepas dari basis masa pemilih yang dimiliki oleh JP yang berasal dari kawasan pedesaan dan mereka yang berasal dari kalangan dengan tingkat pendidikan rendah. Dengan lonjakan ekonomi yang didapatkan pada masa pemerintahannya, Kirchner dengan mudah untuk menguatkan basis-basis kekuatan politiknya dengan berbagai macam kebijakan ekonomi distributif (de la Torre, 2016) (Szwarcberg, 2012).

Meskipun Argentina adalah negara yang menggunakan sistem demokrasi, namun ketimpangan sosial yang tinggi, dan kemiskinan yang buruk masih menjadi gangguan bagi pemerintahan Argentina. Kondisi ini kemudian menjadikan praktik Klientelisme banyak terjadi dan tampaknya bertentangan dengan apa yang

diharapkan dari konsolidasi demokrasi yang terjadi pada tahun 1983. Untuk banyak perkotaan atau pedesaan miskin, Klientelisme telah menjadi mekanisme politik yang lebih menarik, dan pemimpin populis seperti Kirchner menggunakannya untuk memperoleh dukungan politik. Pada masa pemerintah Perón, Peron memberikan tempat istimewa bagi kelas pekerja, mempromosikan industri nasional, serta meningkatkan hak pekerja untuk memasukkan hal-hal seperti pembayaran gaji selama liburan, bonus Natal, dan cuti melahirkan. Kebijakan ini membentuk praktik Clientelism yang sangat kuat dalam politik Peronisme. Clientelism adalah cara Peronisme melakukan politiknya di antara orang miskin. Alasan dibalik praktik politik ini ditujukan adalah mengharapkan imbalan dalam bentuk *voting*. Ketika orang mengalami penurunan dari utilitas marjinal dalam pendapatan maka orang miskin lebih responsif terhadap hadiah-hadiah politik yang ditargetkan secara taktis (Ponce, 2006).

Pemilih Peronis menerima karung yang diisi dengan botol minyak goreng, pasta, dan tepung. Sebagai imbalannya, para pemilih berjanji untuk memberikan suara mereka untuk kandidat tertentu selama pemilihan, baik legislatif maupun eksekutif (Gilbert, 2015). Selain itu pemerintahan Kirchner juga membuat kebijakan-kebijakan yang diarahkan untuk memperkuat basis suaranya di kalangan pekerja seperti peningkatan dana pensiunan bagi pekerja, dan peningkatan bagi para pekerja buruh secara berkelanjutan. Kebijakan-kebijakan ini dapat berjalan dengan baik dan mudah bagi Kirchner akibat modal yang didapat dari ledakan komoditas yang sangat menguntungkannya



Gambar 3.4: Tingkat pendidikan dan ekonomi pada pemilih Argentina (Lupu & Stokes, 2009)⁴

Dalam kajian yang dilakukan oleh Lupu dan Stokes (2009), terlihat adanya perbedaan dalam pola pemilih di dalam politik Argentina. Dalam kajiannya, Lupu dan Stokes mencoba untuk membagi pemilih menjadi dua, terdidik dan tidak terdidik. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis dari pemilihan umum tahun 1946 sampai dengan tahun 2003. Dari hasil yang didapat, *Justicilist Party* cenderung memiliki basis suara dari kalangan buruh dan mereka yang tidak terdidik. Selama periode redemokrasi (pasca 1983) saat ini, pembagian kelas antara para pendukung partai sebagian besar mengikuti kebijakan partai, dengan Partai Radikal mewakili kelas menengah dan atas melawan Partai Peronis, yang disukai oleh pekerja dan kelas bawah. Kemampuan Peronis untuk mempertahankan dukungan kelas pekerja dan

⁴ set data ini berisi lebih dari tiga belas ribu pengamatan selama pemilihan. Penelitian ini mencocokkan pengembalian data dari tujuh sensus nasional yang dilakukan selama abad ke-20 dan pada tahun 2001. Secara khusus, penelitian memasukkan data tentang literasi dan urbanisasi. Penelitian ini menggunakan literasi sebagai proxy untuk kelas sosial. Penelitian ini mengkorelasikan tingkat sadar huruf, kelas pekerjaan, dan kelas sosial. Angka 0-75 menandakan dari kalangan dengan tingkat pendidikan dan ekonomi tinggi. 0- (-75) menandakan dari kalangan dengan tingkat pendidikan dan ekonomi rendah

kelas bawah dikaitkan dengan strategi politik Klientelisme yang menargetkan orang miskin.

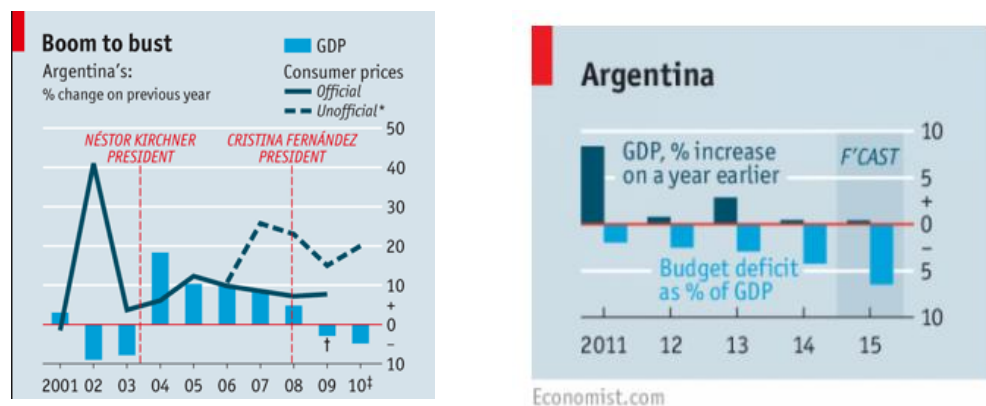
Kebijakan yang dilakukan Kirchner guna tetap mempertahankan dukungan terhadapnya adalah dengan mencoba untuk melakukan distribusi ulang sumber daya dan penyediaan kebutuhan dasar yang lebih besar oleh negara, tetapi kebijakan ini tidak dihasilkan dari perubahan struktural dalam kebijakan sosial yang baik. Kebijakan itu ditargetkan paling banyak kepada sektor masyarakat yang rentan, oleh karena itu meskipun ada penurunan yang cukup besar di tingkat kemiskinan, hal ini tidak mewakili perubahan dalam struktur masyarakat. Meskipun perbaikan ekonomi dalam hal ketidaksetaraan dan kemiskinan telah menjadi sarana paling penting bagi pemimpin populis untuk mendapatkan dukungan dari kantong-kantong suaranya, hanya kelompok masyarakat miskin dan rentan terhadap gejolak ekonomi yang mendapat banyak manfaat dari kebijakan-kebijakan sosial Kirchner dan ini kemudian tidak mewakili peningkatan ekonomi secara umum. Meskipun ketidaksetaraan dan kemiskinan jatuh di Argentina di awal 2000-an, ini lebih dikarenakan keuntungan yang didapat oleh Argentina akibat meledaknya komoditas.

Meskipun berhasil melakukan beberapa perbaikan dalam ekonomi Argentina, pemulihan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi tidak mewakili kesuksesan pemerintah Kirchner. Hal ini dikarenakan karena kondisi ekonomi internal dan eksternal Argentina pada masa itu yang menguntungkan, yaitu devaluasi besar yang mendorong ekspor dan ledakan komoditas (permintaan dunia yang besar untuk produk primer). Keberhasilan Kirchner periode pemerintahannya diperoleh dari keuntungan kondisi internal dan eksternal. Mengambil keuntungan dari hambatan impor, dan borjuasi tingkat nasional. Produksi tumbuh dengan mengeksploitasi

pekerja berbayar rendah tanpa investasi atau teknologi baru yang signifikan. Ledakan komoditas utama yang menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang cukup besar di Argentina harus memang sangat menguntungkan Kirchner, karena ukuran kebijakan yang tepat digunakan pada saat yang tepat, memanfaatkan kondisi domestik dan internasional. Namun, tidak benar untuk mengatakan bahwa sistem itu mampu berubah dan memperbaiki struktur sosioekonomi. Argentina telah mencapai tingkat pertumbuhan yang tinggi berkat ledakan komoditas dan dapat membiayai program redistributif, tetapi kebijakan ini tidak bisa diterapkan lebih lanjut dimasa menurunnya harga komoditas. Mereka tidak menargetkan semua sektor masyarakat dan juga karena kebijakan ini secara finansial kontingen. Peningkatan ini tampaknya lebih bersifat sementara daripada efek dari kebijakan pembangunan yang berkelanjutan. Tingkat pertumbuhan yang tinggi tidak menghasilkan perbaikan substansial di bidang sosial. Kelas menengah telah diperas dan situasi kelas pekerja telah memburuk. Tampaknya penurunan ketidaksetaraan di Argentina lebih terkait dengan keberuntungan dalam hal perdagangan dan perbaikan ekonomi secara umum daripada dengan kebijakan yang baik (Veltmeyer, 2009).

Sejak 2011, bagaimanapun, Argentina telah mulai menunjukkan tanda-tanda pertama kemerosotan ekonomi. Ledakan komoditas berakhir, harga kacang kedelai, ekspor utama Argentina, turun hingga 40% pada tahun 2014. Pertumbuhan ekonomi rata-rata mencapai 1% dan defisit fiskal telah meningkat karena meningkatnya subsidi dalam utilitas dan transportasi. Selain itu, inflasi tumbuh dan pemerintah tidak dapat mengatasinya melalui kontrol harga. Kontrol modal untuk menangkis tekanan pada cadangan negara menghasilkan munculnya pasar gelap untuk dolar AS, memicu ketidakpuasan di antara kelas menengah. Sejak tahun 2012, pemerintahan Christina

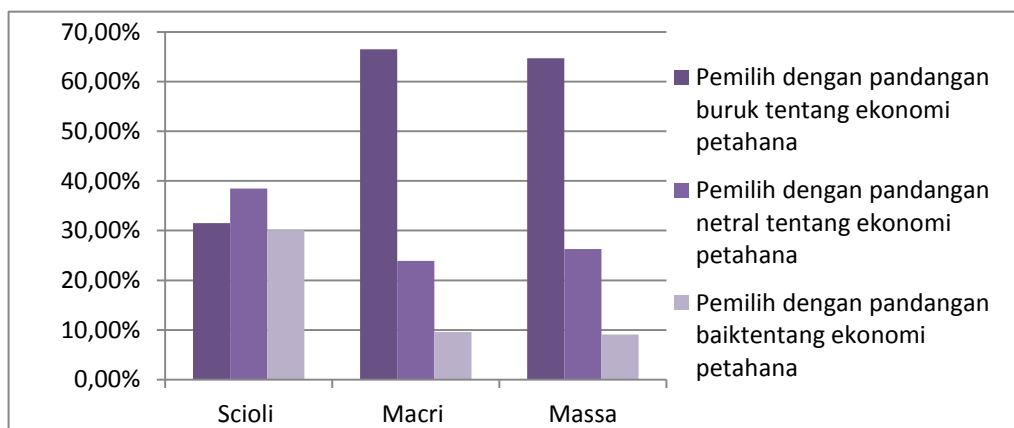
Kirchner mengalami permasalahan ekonomi yang cukup pelik. Inflasi yang mencapai angka 38%, serta pertumbuhan ekonomi yang mencapai -2% pada tahun 2014 (Economics, 2017). Permasalahan ini diperparah dengan devaluasi mata uang Peso Argentina sebesar 30%, yang ditenggarai akibat kebijakan ekonomi populisme dan proteksionis dari Kirchner.



Gambar 3.5: Kondisi Ekonomi dan PDB Argentina Setelah Berakhir Ledakan komoditas (Economist, Mauricio Macri's victory marks a shift away from populism for Argentina—and South America, 2015)

Kondisi ini dimanfaatkan untuk mengambil alih kekuasaan yang di kuasai oleh JP. Dalam masa kampanye pemilihan Presiden 2015, *Cambiamos* berfokus pada masalah ekonomi yang mengguncang Argentina dan gaya pemerintahan lama. Partai PRO berada pada ideologi tengah-kanan membawa gelombang perubahan dengan penawaran alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh Kirchner. Setelah memenangkan nominasi di dalam koalisinya, Mauricio Macri mengidentifikasi dirinya sebagai kandidat moderat dan kampanye presiden Macri berpusat pada beberapa slogan seperti “*Let's Change*”, “*Returning to the world*” (ekonomi pasar). Janji dalam kebijakan ekonomi Macri meliputi mengakhiri pembatasan akan valuta asing, memerangi inflasi dan mengakhiri kemiskinan. Para ekonom Macri menjanjikan penargetan inflasi, kebijakan kurs mengambang, dan independensi bank

sentral dan ini merupakan kebijakan standar yang dipromosikan IMF di seluruh dunia (B.Cibles, 2016). Selain itu, mengenai perjanjian perdagangan bebas, Macri ingin menyetarakan kembali kebijakan luar negeri Argentina dengan kebijakan AS (dan jauh dari negara-negara Amerika Latin kiri-tengah lainnya). Dengan kata lain, mereka jelas mendukung pengembalian kebijakan pasar bebas, pasar keuangan internasional, dan akumulasi utang.



Gambar 3.6: Pandangan Pemilih Tahun 2015 Terhadap Ekonomi era Christina Kirchner (Lupu, 2016)

Dari gambar diatas, terlihat bagaimana adanya konsepsi kegagalan yang dialami pemerintahan Kirchner dalam mengelola ekonomi negara. Konsepsi ini berkembang menjadi landasan kuat terhadap dukungan yang akan didapatkan oleh penantang petahana. Kegagalan Kirchner ini memberikan peluang yang cukup besar bagi Macri mendapatkan suara-suara dari basis pemilih yang merasa perlu adanya perubahan dari pola perekonomian yang dibangun pemerintahan kirchner. Evaluasi ekonomi ini sangat penting dalam menentukan pilihan pemilih. Seperti yang ditunjukkan oleh Gambar 3.6, pemilih Argentina yang menyukai Kirchner dan berpikir bahwa ekonomi berada di jalur yang akan benar memilih Scioli, yang mereka anggap sebagai penggantinya. Mereka yang tidak menyukai Kirchner dan melihat ekonomi

yang terseok-seok yang membutuhkan perubahan mendukung Macri. Pemilih terbagi menjadi pemilih yang menginginkan kontinuitas atau perubahan (Lupu, 2016).

Dengan evaluasi ekonomi ini, maka memilih Macri adalah sebuah pilihan yang paling rasional bagi mereka yang menginginkan adanya perubahan manajemen ekonomi negara. Dengan program-program yang dibawa oleh Macri, jelas Macri menawarkan sesuatu yang berbeda dari pemerintahan sebelumnya, liberalisasi ekonomi. Kedua calon lainnya Massa dan Scioli memiliki masalah yang sama, yaitu bagian dari pemerintahan Kirchner, dan lekat dengan pola kebijakan yang sama, sehingga kecenderungan pemilih yang menginginkan perubahan ekonomi sepenuhnya dimanfaatkan oleh Macri untuk mendulang suara.

III.3 Fragmentasi di Dalam *Justicialist Party*

Seperti yang telah dijelaskan pada awal bab ini, kudeta pada tahun 1955 mengakibatkan JP bubar dan menjalankan organisasinya tanpa ada komando yang jelas. Hal ini membuat perubahan radikal dalam struktur peronism dan menghambat konsolidasi partai. Pergerakan 'bawah tanah' Peronisme menjadikan desentralisasi gerakan yang ada dalam kelompok-kelompok Peronis, dan kelompok bawah tanah lain yang tetap setia setia kepada Perón. Selama dekade ini kelompok-kelompok tersebut menjadi kelompok Peronisme tingkat nasional yang menjadi federasi tidak terikat kelompok-kelompok yang setia kepada Perón. Hal ini kemudian memungkinkan timbulnya faksi-faksi dalam JP, dan itu sangat mempengaruhi bagaimana JP akan mendapatkan dukungan (Levitsky, 2003).

Faksi-faksi ini terus berkembang semakin kuat dan mereka cenderung untuk memisahkan diri dari partai mereka untuk menaikkan kandidat mereka sendiri.

Praktik "*ir por afuera*" (bersaing dalam pemilu di luar dari partai asal) telah umum terjadi dalam beberapa dekade terakhir, terutama di JP. Selama kepresidenan Alfonsín, Ménem, De la Rúa dan Duhalde (1983-2003), ada rata-rata 3 sampai 4 Peronis pembangkang daftar per tahun bersaing dengan resmi daftar JP baik untuk tingkat nasional (Presiden, Wakil, dan Senator) dan Provinsi (Gubernur). Selama kepresidenan Néstor Kirchner dan istrinya, rata-rata ini melonjak ke 18 pembangkang per tahun (Gervasoni, 2018).

Pada tahun 2003 sampai 2015, kepemimpinan Argentina berada dibawah kendali aliansi *Frente para la Victoria* (FpV) dibawah bendera JP. Aliansi di dalam tubuh JP yang dipimpin oleh Néstor Kirchner dan istrinya berhasil memenangkan kepresidenan tiga kali berturut-turut. FpV mencakup beberapa partai kecil, biasanya berideologi kiri seperti *Broad Front*, *Communist Party*, *Humanist Party*, *Radicales K*. Presiden Néstor dan Cristina Kirchner, memilih untuk tidak menggunakan label Justicialista atau Peronista, dan mereka hampir tidak pernah menggunakan kata-kata dalam pidato mereka selama masa tersebut. Mereka kemudian mampu merubah jargon politik sebagai media kampanyenya. Selama masa pemerintahan mereka memimpin Argentina setelah 2003, umumnya jargon yang dikenal adalah *Kirchnerismo* (bukan *Peronismo*) dan melebel diri mereka sebagai *Frente para la Victoria* (bukan JP). Pilihan retorik ini mencerminkan bagaimana Kirchner mengabaikan partai mereka.

Namun dengan sistem kepartaian yang bersifat federal, FpV, cabang-cabang Provinsi dapat dengan mudah melepaskan diri dari kepemimpinan nasional. Dengan demikian, JP dan FpV sebenarnya telah berkompetisi melawan satu sama lain dalam

pemilu di beberapa provinsi dan juga nasional. Contohnya adalah pada pemilihan tahun 2005 di Provinsi Buenos Aires, setelah gagal untuk mencapai kesepakatan pada siapa JP akan mempercayakan tiket calon Presiden, mantan Presiden dan Walikota Buenos Aires Eduardo Duhalde mendapatkan resmi tiket resmi partai dan Presiden Kirchner meluncurkan daftar FpV (Anderson, 2009).

Pemilu 2003 adalah pemilu pertama yang menampilkan tiga kandidat JP bersaing dalam kontestasi presiden, dan seperti telah dibahas sebelumnya hal ini mengakibatkan ketidakstabilan dalam sistem kepartaian JP. Kandidat JP yang pertama adalah Carlos Ménem, saat ini menjadi calon dari koalisi yang dipimpin oleh UCeDé. Néstor Kirchner, yang juga merupakan calon dari JP maju dari faksi FpV, calon JP terakhir adalah Adolfo Rodríguez Saa, yang naik dari faksi *Frente del Movimiento* (FMP). Pada titik ini terlihat bagaimana faksi di dalam JP ini mulai menjadi instrumen untuk ambisi politik individu dari pemimpin faksi. Ini memperlihatkan bagaimana faksi-faksi yang diakibatkan oleh sistem partai JP yang sangat cair berakibat pada kebutuhan untuk satu pemimpin JP secara kepartaian tidak lagi ada. Kelompok-kelompok dan individu yang ada didalam JP dengan sangat mudah melakukan kampanye dengan label politik baru, dan ini sangat mempengaruhi suara dari JP.

Pemilu tahun 2007 juga mengikuti tren lebih dari satu kandidat yang berasal dari JP. Alberto Rodríguez Saá maju kembali pada bursa calon lagi Presiden, kali ini di bawah label FREJULI (*Frente Justicia, Unión y Libertad*). Suatu fakta yang menarik adalah bahwa FREJULI adalah nama, label politik yang digunakan Peron untuk berkampanye pada tahun 1973. Sedangkan Christina Fernande de Kirchner maju dari faksi FpV, dan berhasil mengalahkan Alberto. Pemilihan umum 2009 juga

memberikan pola yang sama dengan kemenangan meyakinkan FpV dan Fernández de Kirchner. Lawannya kali lagi-lagi Alberto Rodriguez Saa yang berkampanye dengan bendera JP, kali ini di bawah label *Union and Liberty*.

Pada pemilihan Presiden tahun 2011, calon presiden yang berasal dari JP terdapat tiga kandidat, dibandingkan dengan pemilu tahun 2007 yang menampilkan hanya dua. Christina Kirchner adalah calon favorit kembali mewakili faksi FpV. Dalam pemilu ini FREJULI digantikan dua faksi lainnya dari JP, sebuah koalisi Peronis, *Alianza Compromiso Federal* (ACF) yang menawarkan Alberto Rodriguez Saa dan *Union popular* (UP) menawarkan Eduardo Duhalde sebagai calon Presiden.

Untuk tahun 2015, JP kembali terpecah menjadi beberapa kekuatan. Daniel Scioli adalah calon yang mendapatkan tiket pencalonannya dari FpV. Sedangkan satunya adalah Sergio Massa yang maju dari faksi *Union for Alternatif*. Massa sendiri sebelumnya adalah bagian depan dari kemenangan FpV. Sebelumnya ia bekerja di bawah Fernández de Kirchner, sebagai Ketua ANSES (Badan Jaminan Sosial Nasional) dan kemudian Walikota Tigre, kota pinggiran Buenos Aires dengan populasi hampir 400.000. Setelah pengunduran diri sebagai kepala staf, ia kembali untuk melayani sebagai pemimpin Tigre hingga 2013 ketika ia memenangkan kursi sebagai wakil nasional dalam Dewan Perwakilan (majelis rendah Kongres) untuk provinsi Buenos Aires.

Terpecahnya kekuatan JP ini berhasil dimanfaatkan oleh kekuatan oposisi untuk mengambil kendali negara dari proses pemilihan. Faksi yang terbelah dalam tubuh JP ini berimbas pada terbaginya suara pemilih JP yang berada dalam kedua faksi ini, dengan basis suara yang sama, masyarakat miskin dan para pekerja buruh.

Hal ini diperparah dengan kedua calon dari JP ini sama-sama memasarkan janji ekonomi yang sama, tetap mempertahankan pola ekonomi dibawah pemerintahan Kirchner. Dengan konsepsi kampanye yang relatif sama antar satu sama lain, semakin memberikan celah bagi oposisi untuk dapat merebut kantong-kantong suara yang menginginkan adanya perubahan.

III.4 Kekuatan Oposisi

Ketidakstabilan dan lemahnya sistem organisasi dan kepartaian ini , terutama pada akhir 1990-an dan tahun 2000-an telah mengakibatkan rentannya kekuatan JP sebagai sebuah partai. Fragmentasi dalam tubuh partai menjadi beberapa faksi, telah menjadikan faksi sebagai instrumen untuk melayani ambisi politisi individu, yang tidak secara jelas mengadopsi ideologi JP. Hal ini menunjukkan proses deinstitutionalisasi partai serta berdampak buruk bagi keberlangsungan kekuatan partai. Pemilihan Presiden tahun 2003 yang telah dianalisis sebelumnya adalah contoh yang baik tentang partai yang terbagi menjadi tiga faksi, yang tampaknya hanya untuk memutuskan ambisi para politisi individual. Dalam hal ini JP memiliki hubungan yang kurang kuat antara partai dan para pemimpinnya serta antara partai dan faksinya, dan sangat rentan untuk dikalahkan oleh pihak oposisi.

Langgengnya kekuasaan Kirchner juga berakar dari kelemahan oposisi. UCR yang merupakan Partai non Peronis terbesar dan satu-satunya yang pernah memenangkan pemilihan yang di Argentina, melemah sejak tahun 1990-an. Sejak awal kemenangan Raul Alfonsín pada pemilihan presiden yang dilakukan secara demokratis pertama kalinya pada tahun 1983, kekuatan politik UCR terus tergerus dan tidak pernah mencapai puncak kekuasaan lagi setelahnya, baik eksekutif maupun legislatif.

Perbedaan ini terlihat jelas dari perbedaan suara pada Pemilihan Presiden yang jatuh dari lebih dari 50 % pada tahun 1983 dan hanya 2% pada tahun 2003, serta 12% pada tahun 2011, dan pada 2007 perwakilannya di Kongres hanya 30 kursi dari 257 yang menjadi terendah sepanjang sejarah. Dekomposisi Partai UCR dimulai dengan kekalahan Alfonsín pada tahun 1989 oleh calon dari JP, Carlos Ménem, serta pembelotan pemimpin seperti Carrió dan López Murphy. Meskipun begitu, UCR tetap mempertahankan basis suaranya dengan adanya kekuatan pemimpin lokal dan jaringan aktivis yang setia. Hal ini diharapkan dapat menciptakan potensi untuk pemulihan masa depan. Namun, Radikal mulai tidak bertarung pada kontestasi Pemilihan Presiden sejak 1999, dan hanya menjadikan status partai sebagai salah satu kekuatan politik yang tidak dapat bersaing secara elektoral (Levitsky & Murillo, 2008).

Tidak satu pun dari partai-partai oposisi yang muncul dari melemahnya UCR yang kemudian menjadi sebuah kekuatan yang mampu menyaingi JP. Ari, PRO, LDS tidak mampu untuk menggantikan UCR sebagai kekuatan penantang JP. JP memiliki hampir 300.000 aktivis (hampir 1 % dari populasi) di seluruh negeri, hampir sepuluh kali lebih banyak aktivis ARI dan PRO disatukan. Basis suara dari partai non-peronis sebagian besar ke pusat-pusat perkotaan. Akibatnya, meskipun pemilihan di wilayah metropolitan utama tetap sangat kompetitif (Cristina Kirchner kalah di Buenos Aires, Córdoba, dan Rosario), JP hampir tak tertandingi di banyak provinsi kecil.

Runtuhnya UCR secara elektoral tidak diikuti dengan munculnya partai-partai baru yang stabil. Semua baru partai besar yang muncul selama 1980-an dan 1990-an sangat lemah dalam membentuk poros kekuatan dan gagal untuk melampaui partai-partai utama yang lebih dulu ada. Partai-partai baru ini yang juga merupakan bagian

dari kepentingan mantan anggota partai lama seperti UCR, JP, yang mengakibatkan partai tersebut sangat dipengaruhi oleh sosok pemimpinnya, fenomena ini mengakibatkan partai-partai baru ini sangat rentan untuk bertahan lama. Dua partai baru yang muncul pada tahun 2003, ARI dan PRO, bernasib sedikit lebih baik. PRO menerima 2 % suara pada tahun 2007 dan telah menjadi salah satu pemain utama politik Argentina khususnya di daerah kota seperti Buenos Aires dan Cordoba. Sedangkan ARI meskipun mendapatkan dukungan yang relatif lebih sedikit, namun mereka dapat mempertahankan suaranya.

Kelemahan oposisi non-peronis ini memiliki beberapa konsekuensi penting. Pertama, dengan kondisi ini menjadikan tidak adanya oposisi yang kuat dan mampu menantang JP di arena pemilu. Sejak tahun 2003, kekuatan partai non-peronis terbagi menjadi dua sampai tiga kekuatan, sehingga menimbulkan kesenjangan suara antara JP dan partai-partai non-peronis lainnya. Sebagai akibatnya, JP muncul sebagai partai dominan secara de facto dalam konstelasi politik Argentina, meskipun dilanda perpecahan internal. Dalam pemilihan Presiden tahun 2003, dan 2007 dua kandidat yang berhasil mendapatkan peringkat satu dan dua merupakan peronis, dan dalam pemilu legislatif 2005, tidak ada partai non-Peronis memenangkan bahkan 10 % suara secara nasional. Dalam pemilihan Presiden, kelemahan partai oposisi dapat diatasi dengan relatif mudah. Karena sebagian besar pemilih kelas menengah besar Argentina bersandar anti-Peronis, sebuah kekuatan koalisi non-peronis kekuatan (seperti dalam 1999), atau calon yang muncul sebagai fokus bagi pemilih non-peronis, mungkin cukup untuk mengalahkan kandidat presiden JP.

Tabel 3.2: Daftar Koalisi Pemerintah dan Koalisi Oposisi Argentina

Periode	Pemerintah	Netral	Oposisi
2001	JP	ARI	UCR, FREPASO
2003	JP		UCR, ARI, CC
2005	JP	CC	UCR, ARI
2007	JP	UCR	PRO, ARI
2009	JP		UCR, PRO, ARI, CC
2011	JP	ARI	UCR, PRO, CC
2013	JP		UCR, PRO, ARI, CC

Sumber: (Jones, Hwang, & Micozzi, 2014)

Perubahan pola oposisi ini kemudian mencapai titik terang dalam penyatuan kekuasaan pada tahun 2015. Pada tahun 2015, untuk pemilihan umum (presiden, wakil nasional dan senator, gubernur dan legislatif lokal), PRO membuat koalisi nasional dengan partai besar kedua, UCR, dan dengan partai politik lainnya (nasional dan provinsi), yang disebut dengan koalisi *Cambiemos* dengan slogannya *Let's Change*. UCR adalah mitra utama PRO dalam aliansi besar ini dengan beberapa pihak lain, di antaranya adalah *Coalición Cívica - Afirmación para una República Igualitaria* (ARI), dan ketiganya merupakan tiga oposisi yang paling penting dalam dekade terakhir. Koalisi UCR dengan beberapa partai lainnya sempat ditentang oleh faksi internal dari Partai UCR. Karena alasan itu, koalisi tidak terbentuk di beberapa provinsi/daerah pemilihan (misalnya, di Provinsi Santa Cruz, Pro tidak berpartisipasi dalam pemilihan). Di provinsi lain, koalisi jauh lebih besar, termasuk kekuatan-kekuatan baru yang tidak bersekutu dengan PRO di tingkat nasional (misalnya, di

provinsi Jujuy, yang mana kandidat gubernur membentuk aliansi dengan PRO dan UNA, kedua pihak yang bersaing di arena nasional) (Bollig & Sdrigotti, 2016).

Macri tampaknya sangat menyadari tantangan ini untuk memenangi Pemilihan Presiden dan mulai membangun kekuatan koalisi yang luas pada awal 2015. Hal krusial yang dibangun oleh Macri dalam pembentukan koalisi ini jelas dengan membawa UCR ke dalam peta koalisinya. Dengan kekuatan yang UCR miliki, berarti mereka dapat menyediakan Macri dengan aktivis, pergerakan massa, organisasi, dan yang sangat penting sebagai penyeimbang dari kurangnya suara Macri di kawasan pedesaan. Sebagai gantinya, Macri memberikan apa yang kelompok UCR tidak miliki sejak 1989: seorang kandidat presiden yang dapat terpilih.

Seperti yang dapat kita amati dalam hasil pemilu, kinerja pemilu PRO secara khusus difokuskan di wilayah metropolitan negara itu: 80 % dari deputinya dan 4 lebih dari 6 senator berasal dari provinsi metropolitan, wilayah yang sama di mana Macri memperoleh mayoritas suara untuk terpilih menjadi presiden. Sebagian besar pendukung dan afiliasinya terletak di daerah-daerah negara ini juga: 55,72 % afiliasi berasal dari wilayah metropolitan, 40 % hanya dari Provinsi Buenos Aires dan Federal.

Dengan membangun koalisi yang sangat kuat, maka dengan sangat mungkin koalisi ini kemudian membalikkan keadaan politik Argentina yang sebelumnya dikuasai oleh JP. Koalisi ini seakan menjadi alternatif dari permasalahan ekonomi dan politik Argentina. Sejak awal pembentukannya, *Cambiamos* telah berhasil memaksimalkan pemilih mereka yang sebagian besar terletak di wilayah metropolitan. Argentina adalah negara yang sangat asimetris dalam segi

pembangunan di mana ada provinsi dengan tingkat perkembangan yang tinggi dan yang lain dengan perkembangan yang lebih rendah. Ketidakseimbangan dalam pembangunan provinsi-provinsi di Argentina, mengakibatkan adanya polarisasi pembangunan yang berdampak pada polarisasi pemilih di Argentina. Mereka yang berasal dari provinsi dengan tingkat pembangunan lebih baik, relatif memiliki tingkat pendidikan yang baik dan banyak yang tergolong sebagai *middle class*. Sedangkan Provinsi yang tergolong rendah dari segi pembangunan, memiliki peta pemilih yang tersebar dari kalangan berpendidikan rendah dan tingkat ekonomi menengah kebawah. Sehingga kita dapat mengidentifikasi pola klasifikasi yaitu : partai metropolitan dan partai pinggiran. Karena itu, partai-partai politik memiliki platform yang sesuai untuk masing-masing basis suara mereka.

Partai dengan basis dari daerah metropolitan akan memfokuskan platform dan kebijakan mereka pada pemilih perkotaan, kelas pekerja dan kelas atas dengan menawarkan kebijakan-kebijakan ekonomi berbasis mazhab neoliberal. Sebaliknya, partai-partai yang berbasis pada daerah pinggiran lebih berorientasi pada kelas pedesaan dan secara umum cenderung memiliki pandangan yang lebih konservatif dan tradisional. Pada akhirnya, perpecahan ideologis, kelas ini sebagian besar ditentukan oleh karakteristik konstituen di mana partai politik beroperasi.

Menurut kategori ini, PRO adalah sebuah partai metropolitan, dengan ideologi sayap kanan yang jelas berorientasi pada kelas menengah dan atas. *Cambemos* dan Macri menang di provinsi-provinsi yang cukup strategis, sedangkan FpV lebih kuat di antara provinsi-provinsi pedesaan dengan tingkat ekonomi yang relatif rendah di sekitar Kota Buenos Aires yang selama ini memang menjadi basis suaranya. Pada beberapa provinsi yang paling padat penduduk dan dinamis secara

dengan 16,3 juta penduduk). Dengan kemenangan di beberapa kota besar tersebut, *Cambios* berhasil mengalahkan FpV setelah mereka menguasai lebih dari dua dekade.

Kemenangan *Cambios* tidak dapat dilepaskan dari kekuatan koalisi ini dalam membangun kekuatannya. Dengan berlandaskan ideologi politik yang hampir sama (konservatif dan neoliberalisme), koalisi ini berhasil memaksimalkan potensi wilayah-wilayah yang selama ini menjadi basis suara dari beberapa partai mitra koalisi. Wilayah perkotaan memang menjadi basis suara dari partai-partai non-peronis, dan selama ini menjadi perebutan suara dari beberapa partai mitra koalisi *Cambios*. Dengan bersatunya partai-partai yang memiliki basis suara yang sama, maka dukungan akan mudah untuk disatukan. Hal inilah yang kemudian mengakibatkan menguatnya *Cambios* dalam mengalahkan Fpv dalam pemilihan tahun 2015.

Dari penjelasan di atas, dapat dilihat peran yang cukup penting dari krisis ekonomi di Argentina yang disebabkan oleh kegagalan Cristina Krichner untuk dapat memperbaiki fundamental ekonomi Argentina yang berasal dari ledakan komoditas yang terjadi pada awal tahun 2000an. Ketidakmampuan ini disebabkan oleh adanya gaya politik populisme dan praktik Klientelisme yang dimanfaatkan oleh mereka untuk mendapatkan dukungan suara menggunakan keuntungan ekonomi yang didapat pada masa itu, hanya berdampak pada jangka pendek tanpa adanya keberlangsungan kuatnya fundamental ekonomi. Selain itu peran dari perpecahan JP dan menguatnya mitra koalisi telah berhasil untuk mengumpulkan kantong-kantong suara untuk menjatuh JP.

Kegagalan ini berhasil dimanfaatkan oleh oposisi dengan memberikan pendekatan dan janji ekonomi yang berbeda dari pemerintahan sebelumnya serta berkoalisi dengan cukup baik bersama dengan partai partai non-Peronis. Pendekatan ekonomi dan ideologi neoliberalisme yang dibangun oleh mitra koalisi oposisi memberikan sebuah opsi yang paling rasional terhadap pemilih bagi permasalahan ekonomi di Argentina. Macri memberikan janji politik yang sangat berbeda dengan apa yang ditawarkan oleh dua kandidat kuat lainnya, yang sering diafiliasikan sebagai bagian dari pemerintahan Kirchner.

Dengan konsep yang sama seperti pada bab sebelumnya, bahwa pemilih di Argentina cenderung untuk mengalihkan suaranya kepada calon yang berlawanan dengan *status quo*. Pola kemenangan Alfonsín pada tahun 1983, kembali terulang dengan terpilihnya Macri sebagai Presiden tahun 2015, mereka sama-sama menawarkan sebuah pendekatan baru bagi masalah-masalah yang dialami oleh Argentina pada masanya masing-masing. Alfonsín pada masanya menjadi calon yang paling rasional untuk mengatasi permasalahan demokrasi dan HAM di Argentina, sedangkan Macri dianggap dengan neoliberalisme dianggap sebagai penyelamat terhadap kegagalan kebijakan ekonomi populisme yang dibangun oleh Kirchner.

BAB IV

KESIMPULAN

IV.1 Kesimpulan

Peta politik di Amerika Latin mengalami perubahan dengan sangat dinamis dan dengan berbagai macam faktor yang menjadi penyebab. Krisis ekonomi, perubahan politik global, serta demokratisasi. Pada awal 2000-an , negara-negara di Amerika Latin sering disebut dengan sebutan '*pink tide*'. Pada satu sisi mereka menggunakan sistem demokrasi dalam segi politik, namun mereka menganut sistem ekonomi nasionalis dan sering dikaitkan dengan populisme, hal demikian juga terjadi di dalam politik Argentina di bawah kendali pemerintahan Néstor Kirchner dan istrinya Christina Kirchner selama 15 tahun dengan bendera sayap kiri *Justicialist Party*.

Namun kemenangan koalisi Mauricio Macri (*Cambiamos*) yang pro terhadap neoliberal dalam pemilu Argentina pada tahun pada tahun 2015, menjadikan politik di Argentina bergeser dari yang sebelumnya dikusai oleh sayap kiri, beralih ke sayap tengah-kanan. Kemenangan Macri ini terjadi ketika perekonomian Argentina sedang mengalami krisis. Sejak tahun 2012, pemerintahan Christina Kirchner mengalami permasalahan ekonomi yang cukup pelik.

Berdasarkan analisis penulis dengan menggunakan teori *Political Economy of Political Transition* dari Haggard dan Kauffman, yang membagi variabelnya menjadi lima, yaitu peran militer dalam politik, partisipasi masyarakat

dan demokrasi, tantangan terkait politik ekonomi, dan lemahnya *continuist party*, serta peran oposisi. Penulis mendapatkan temuan untuk menjawab pertanyaan penelitian mengenai perubahan politik di Argentina pada tahun 2015 dari yang sebelum dikuasai partai sayap kiri berganti dengan koalisi *Cambiemos* yang berhaluan Neoliberal.

Pertama, terkait dengan variabel eliminasi pemerintahan yang otoriter dan pengurangan peran militer dalam politik, penulis melihat bahwa militer dan politik di Argentina merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan. Militer merupakan elemen penting dalam menganalisis peta politik Argentina. Pada tahun 1960-an dan 1970-an, militer menggunakan legitimasi politik yang didapatkannya untuk menjadikan mereka sebagai kekuatan politik yang dapat memutuskan kebijakan strategis terkait kepentingan nasional. Pada masa ini, militer memberlakukan kebijakan seperti dapat menghapus presiden dari jabatannya, memantau serta menilai keadaan nasional Argentina dari kacamata sendiri, memberlakukan *Proceso* dengan tujuan untuk menindas dan memaksa para kelompok yang dianggap penentang program ekonomi pemerintah *Proceso* termasuk oposisi, serta merepresif media.

Namun, kekalahan militer dari tangan Inggris dalam Perang Malvinas menjadi titik balik transisi politik di Argentina. Argentina memiliki USD 36 miliar hutang luar negeri dan menjadi salah satu yang tertinggi di dunia pada masa itu, sementara tingkat inflasi yang tinggi melanda negara itu. Rezim militer kemudian didiskreditkan di mata masyarakat sipil dengan banyak penduduk yang mengkritik militer senior yang bertanggung jawab atas kasus *Dirty War*. Kekalahan di Malvinas ditambah dengan krisis ekonomi serta perpecahan internal

dari militer akhirnya menyebabkan runtuhnya rezim militer dan kembali ke pemilihan demokratis pada tahun 1983. Kembalinya demokrasi menandai berakhirnya peran militer yang mendominasi politik Argentina sejak 1930.

Kedua, terkait dengan variabel hambatan politik, naiknya Alfonsín dalam tampuk kekuasaan pada tahun 1983, memberikan semangat baru bagi demokrasi Argentina. Selain melakukan demiliterisasi terhadap politik Argentina, Alfonsín juga berupaya untuk memperkuat pondasi bagi kebebasan politik serta penyelesaian atas kasus-kasus HAM yang terjadi selama masa pemerintahan Junta Militer. Langkah-langkah diambil Alfonsín dalam proses demokratisasi adalah penguatan hak-hak sipil dasar, membuka ruang kebebasan berpendapat, menyelesaikan kasus *Proceso*, dan memberikan pondasi bagi pemilihan umum yang stabil dan baik.

Demiliterisasi dan demokratisasi telah memberikan legitimasi politik bagi masyarakat sipil sebagai Presiden Argentina serta memberikan pondasi politik. Setelah naiknya Alfonsín, Presiden Argentina selalu dijabat oleh masyarakat sipil, tanpa adanya kudeta yang terjadi. Demiliterisasi juga memberikan proses politik yang stabil dengan pemerintah dan oposisi dari berbagai ideologi dapat mencapai kekuasaan dengan cara konstitusional. Kebijakan-kebijakan ini menjadi pondasi kuat terhadap demokrasi di Argentina dan sangat berpengaruh dalam pemilihan-pemilihan berikutnya, termasuk pada pemilihan presiden tahun 2015.

Ketiga, variabel mengenai tantangan politik ekonomi, faktor ledakan komoditas yang terjadi pada awal dekade 2000-an telah memberikan dampak yang sangat positif bagi Argentina. Argentina menikmati peningkatan yang stabil

dalam PDB setelah tahun 2003 yang berlanjut hingga tahun 2011. Ledakan komoditas menjadi landasan kuat guna mempermudah Kirchner untuk menggunakan strategi populis. Keadaan ini mempermudah Kirchner untuk menggunakan pendapatan pajak dan fiskal untuk mensubsidi masyarakat sebagai upaya untuk mengurangi kemiskinan, tapi juga meningkatkan dukungan masyarakat terhadap pemerintahannya melalui program distributif dan praktik politik *clientelism*.

Namun gejolak krisis ekonomi yang dimulai pada tahun 2011 akibat ketidakstabilan kebijakan ekonomi Kirchner ketika diserang oleh krisis ekonomi global, berakibat pada semakin berkurangnya dukungan terhadap pemerintahan Kirchner. Kondisi ini dimanfaatkan oleh koalisi *Cambiemos* untuk mengambil kekuasaan. Koalisi ini menawarkan kebijakan ekonomi neoliberal yang dianggap lebih stabil dan berkelanjutan sebagai alternatif dari kebijakan ekonomi Kirchner yang gagal. Adanya konsepsi kegagalan yang dialami pemerintahan Kirchner dalam mengelola ekonomi negara, menjadi landasan kuat terhadap dukungan yang akan didapatkan oleh penantang petahana. Kegagalan Kirchner ini memberikan peluang yang cukup besar bagi Macri mendapatkan suara-suara dari basis pemilih yang merasa perlu adanya perubahan dari pola perekonomian yang dibangun pemerintahan kirchner.

Keempat, variabel lemahnya *continuist party* terlihat dari fragmentasi yang terjadi dalam tubuh JP telah membawa pengaruh terhadap melemahnya kekuatan elektoral JP pada kontestasi politik. Sejarah panjang pergerakan Peronism yang terdesentralisasi menjadi salah satu faktor mudahnya fragmentasi terjadi di dalam tubuh JP. Praktik "*ir por afuera*" telah relatif umum terjadi dalam beberapa

terakhir dekade. Selama kepresidenan Alfonsín, Ménem, De la Rúa dan Duhalde (1983-2003), ada rata-rata 3 sampai 4 Peronis pembangkang daftar per tahun bersaing dengan resmi daftar JP baik untuk tingkat nasional (Presiden, Wakil, dan Senator) dan Provinsi (Gubernur). Selama kepresidenan Néstor Kirchner dan istrinya, rata-rata ini melonjak ke 18 per tahun.

Terpecahnya kekuatan JP ini berhasil dimanfaatkan oleh kekuatan oposisi untuk mengambil kendali negara dari proses pemilihan. Faksi yang terbelah dalam tubuh JP ini berimbas pada terbaginya suara pemilih JP yang berada dalam kedua faksi ini, dengan basis suara yang sama, masyarakat miskin dan para pekerja buruh. Hal ini diperparah dengan kedua calon dari JP ini sama-sama memasarkan janji ekonomi yang sama, tetap mempertahankan pola ekonomi dibawah pemerintahan Kirchner. Dengan konsepsi kampanye yang relatif sama antar satu sama lain, semakin memberikan celah bagi oposisi untuk dapat merebut kantong-kantong suara yang menginginkan adanya perubahan.

Kelima, terkait dengan variabel pengaruh oposisi yang kuat, penulis berargumen bahwa langgengnya kekuasaan Kirchner sebelum berganti pada tahun 2015 berakar dari kelemahan oposisi. UCR yang merupakan Partai non Peronis terbesar dan satu-satunya yang pernah memenangkan pemilihan yang di Argentina, melemah sejak 1990-an. Hal ini ditambah dengan fakta tidak ada satu pun dari partai-partai oposisi yang muncul dari melemahnya UCR yang kemudian menjadi sebuah kekuatan yang mampu menyaingi JP. Ari, PRO, LDS tidak mampu untuk menggantikan UCR sebagai kekuatan penantang JP.

Pada tahun 2015, PRO membuat koalisi nasional dengan partai besar kedua, UCR, adalah *Coalición Cívica - Afirmación para una República Igualitaria* (ARI), dan merupakan tiga oposisi yang paling penting dalam dekade terakhir. Dengan membangun koalisi yang sangat kuat, maka dengan sangat mungkin koalisi ini kemudian membalikkan keadaan politik Argentina yang sebelumnya dikuasai oleh JP. Dengan berlandaskan ideologi politik yang hampir sama (konservatif dan neoliberalisme), koalisi ini berhasil memaksimalkan potensi wilayah-wilayah yang selama ini menjadi basis suara dan berhasil mengalahkan JP pada pemilihan umum 2015.

Dari penjelasan diatas kelima faktor yang ditawarkan oleh Haggard dan Kaufman berhasil dimanfaatkan oleh koalisi *Cambiamos* untuk memaksimalkan hasil perolehan suara mereka dalam pemilihan tahun 2015. Lebih lanjut penulis mendapatkan temuan bahwa pemilih di Argentina cenderung untuk mengalihkan suaranya kepada calon yang berlawanan dengan *status quo* ketika dilanda krisis. Pola kemenangan Alfonsín pada tahun 1983, kembali terulang dengan terpilihnya Macri sebagai Presiden tahun 2015, mereka sama-sama menawarkan sebuah pendekatan baru bagi masalah-masalah yang dialami oleh Argentina pada masanya masing-masing. Alfonsín pada masanya menjadi calon yang paling rasional untuk mengatasi permasalahan demokrasi dan HAM di Argentina, sedangkan Macri dianggap dengan neoliberalisme dianggap sebagai penyelamat terhadap kegagalan kebijakan ekonomi populisme yang dibangun oleh Kirchner.

IV.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil kesimpulan penelitian pada bab penutup ini, yang menyatakan bahwa, kelima faktor yang dijelaskan oleh Haggard dan Kaufman menjadi alasan berubahnya peta politik Argentina pada tahun 2015, peneliti memberikan beberapa saran atau rekomendasi sebagai berikut:

1. Kepada peneliti lainnya yang ingin meneliti dengan studi kasus yang sama, disarankan untuk meneliti secara kuantitatif untuk melihat pengaruh krisis ekonomi pada perubahan politik di Argentina pada tahun 2015. Penelitian kuantitatif akan melengkapi lebih lanjut kekurangan penelitian ini yang bersifat kualitatif.
2. Penulis merekomendasikan kepada penulis lainnya untuk melihat bagaimana perkembangan dari kebijakan neoliberal yang menjadi kebijakan alternatif pada penelitian ini.

Daftar Pustaka

- A.Fozzi, P. (1988). Argentina, 1976–1982: Labour Leadership and Military Government. *Journal of Latin American Studies*, 111-38.
- Alcantara, M. (1990). *Problems of Democracy in Argentina: Alfonsín, Crisis and Elections*. Barcelona.
- America, P. D. (23 , October 2011). *Republic of Argentina* . Retrieved Juli 7, 2018, from 2011 Legislative Electoral Results:
<http://pdba.georgetown.edu/Elecdata/Arg/leg11.html>
- Americas, P. D. (2011, october 23). *Republic of Argentina*. Retrieved Juli 7, 2018, from Resultados Elecciones Legislativas 2011:
<http://pdba.georgetown.edu/Elecdata/Arg/leg11.html>
- B.Cibles, A. (2016, April 12). *Macri-nomics: Argentina's Fast and Furious Return to Neoliberalism*. Retrieved April 31, 2018, from Counterpunch :
<https://www.counterpunch.org/2016/04/12/macri-nomics-argentinas-fast-and-furious-return-to-neoliberalism/>
- C.Wright, T. (2007). *State Terrorism in Latin America: Chile, Argentina, and International Human Right*. London: Rowman & Littlefield Publisher.
- Calvo Ernesto, and M. Victoria Murillo. (2009). Selecting clients: Partisan networks and the electoral benefits of targeted distribution. *Comparative Politics Workshop*.
- Carlos, J. (1990). *Developing Country Debt and Economic Performance, Argentina, Bolivia, Brazil, Mexico*. Chicago: Unversity Chicago Press.
- Center for Latin Americas, C. f. (n.d.). *República de Argentina / Argentine Republic Constitución de 1994*. Retrieved April 2, 2018, from NATIONAL CONSTITUTION OF THE ARGENTINE REPUBLIC:
http://pdba.georgetown.edu/Constitutions/Argentina/argen94_e.html
- Chodor, T. (2015). *neolibaeral hegemony and the pink tide in latin america*. basingstoke: palgrave, macmillan 2015.
- CIA. (2007). *Falkland Islands Dispute: Economic Impact*.
- CONADEP. (1984). *Nunca Mas*. Argentina.
- Daron Acemoglu, James A.Robinson. (2001). A Theory of Political Transitions. *American Economic Association*, 938-963.

- ECLAC. (2010). *Economic Commission for Latin America and the Caribbean Statistical Yearbook*. SANTIAGO: ECLAC.
- Economics, F. (2017, November 7). *Argentina Economic Outlook*. Retrieved Desember 10, 2017, from Focus Economics: <https://www.focus-economics.com/countries/argentina>
- Economist, T. (2015, November 23). *2015 Argentine presidential election second-round result*. Retrieved Mei 5, 2018, from The Economist: <https://www.economist.com/blogs/graphicdetail/2015/11/mauricio-macri-elected-argentinas-next-president>
- Economist, T. (2015, November 23). *Mauricio Macri's victory marks a shift away from populism for Argentina—and South America*. Retrieved April 28, 2018, from The economist : <https://www.economist.com/news/americas/21678976-next-president-must-fix-sagging-economy-bequeathed-him-his-peronist>
- Economist, T. (n.d.). *Democracy Index*. Retrieved April 2, 2018, from The Economist Intelligence Unit: <https://infographics.economist.com/2017/DemocracyIndex/>
- Edward, S. (2010). *left behind and the false promises of populism*. london: university chichago press.
- Ellis, R. (2014). *China on the Ground in Latin America*. basingstoke: Palgrave Macmillan.
- Gabriela Nouzeilles, Graciela Montaldo. (2002). *The Argentina Reader: History, Culture, Politics*. Durham: Duke University press.
- Gabriele, F. I. (2013). *Argentina Delegative Democracy: A case Study*. Boston: Northeastern University Press.
- Gilbert, J. (2015, Oktober 23). *New Scrutiny on Vote Buying as Argentine Elections Near*. Retrieved Juli 7, 2018, from The New York Times: <https://www.nytimes.com/2015/10/24/world/americas/argentina-elections-cristina-kirchner.html>
- Haggard, Stephen Kaufman. (1995). *The political economy of democratic transitions*. Princeton: Princeton University Press.
- Hoffer, E. (2017). *Civil Engagement in Argentina Afer the Last dictatorship*. Michigan: Eastern Michigan University.

- House, F. (2015). *Argetina*. Retrieved Desember 5, 2017, from Freedom House: <https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2015/argentina>
- Hunter, W. (1996). *Redefining the Military's Role in Argentina, Brazil, and Chile*. UNITED STATES instute of Peace.
- Hunter, W. (1996). *State and Soldier in Latin America : Redefining the Military Role in Argentina, Brazil, Chile*. Washington, DC: United States Institute of Peace.
- Johnson, J. J. (1962). *he Role of the Military in Underdeveloped Countries*. Princeton : Princeton University Press.
- KraullL, C. (2016, Juli 01). *The pendulum swings: Here's how Latin America has shifted politically over the years*. Retrieved Maret 12, 2018, from LA Times: <http://www.latimes.com/world/mexico-americas/la-fg-latin-american-pendulum-adv-snap-story.html>
- Kronfelt, A. (2015). *Four Financial Crises in Argentina:A Comparative Study*. Lund: Lund Univerisity.
- Laclau, E. (2005). *On Populist Reason*. London: Verso Books.
- Lezi, M. (2011). *Metode Penilitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Little, W. (1984). *Civil-Military Relations in Contemporary Argentina*. Spring 19.
- Maki, A. W. (2006). Decentralization and Political Participation:Argentina and Chile in Comparative Perspective. *Government and International Relations Honor*.
- Mazucca, S. (2013). The Rise of Rentier Populism. *Journal of Democracy*24, 108-122.
- Norden, D. L. (1990). Democratic Consolidation and Military Professionalism: Argentina in the 1980s. *Journal of Interamerican Studies and World Affairs, Vol. 32, No. 3*, 151-176.
- P.Huntington, S. (1991). The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century. *Journal of Democracy*.
- Pion-Berlin, D. (1989). *The Ideology of State Terror: Economic Doctrine and Political Repression in Argentina and Peru*. Boulder: Lynne Rienner Publishers.
- Ponce, A. F. (2006). Unemployment and Clientelism: The Piqueteros of Argentina. *MPRA Paper No. 23*.

- Saez, M. A. (2008). *Politicians and Politics in Latin America*. Boulder: Lynne Rienner.
- Sarwono, J. (2006). *Metode penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Jakarta: Workspress.
- Stephen Haggard, Stephen R. Kaufman. (1997). The Political Economy of Democratic Transitions. *Comparative Politics*, Vol 29 No.3 , 263-283.
- Szwarcberg, M. (2012). Uncertainty, Political Clientelism, and Voter Turnout in Latin America: Why Parties Conduct Rallies in Argentina. *Comparative Politics* , 88-106.
- Taylor, L. (1998). *CITIZENSHIP, PARTICIPATION AND DEMOCRACY*. London: MacMillan Press Ltd.
- Torre, J. C. (1998). The Ambivalent Giant: The Peronist Labor Movement, 1945-1995. In J. P. Brennan, *Peronism and Argentina*. Wilmington: Scholarly Resources.
- Umar, B. S. (2012). *Pedoman Penulisan Skripsi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Deepublish.
- Veltmeyer, P. (2009). *What's Left in Latin America: Regime Change*. New Times: Ashgate Publishing Limited.
- Villasenin, L. (2017, November 11). *Argentina's New Cycle*. Retrieved April 28, 2018, from Jacobin : <https://www.jacobinmag.com/2017/11/argentina-elections-macri-cambiamos-kirchner-peronism>
- Weyland, K. (1999). Neoliberal populism in Latin America and Eastern Europe. *Comparative Politics*, 379-401.
- Wiarda, H. J. (1974). *Politics and Social Change in Latin America: The Distinct Tradition*. Amherst: University of Massachusetts Press.
- World Bank, W. B. (2018). *Exports of goods and services (% of GDP)*. Retrieved Mei 2, 2018, from World Bank national accounts data, and OECD National Accounts data files.: <https://data.worldbank.org/indicator/NE.EXP.GNFS.ZS>
- Yunes, M. (2015). The end of a golden decade. *international socialist review*, 98.

